

**Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, Lverage, Pertumbuhan
Penjualan, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik dan *Good Corporate
Governance* terhadap *Tax Avoidance*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di
BEI 2013-2016)**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Dina Artika Andeswari

No. Mahasiswa : 14312380

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, Lverage, Pertumbuhan
Penjualan, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik dan *Good Corporate
Governance* terhadap *Tax Avoidance*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di
BEI 2013-2016)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata- 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Dina Artika Andeswari

No. Mahasiswa : 14312380

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Penulis,



(Dina Artika Andeswari)

**Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, Leverage, Pertumbuhan
Penjualan, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik dan *Good Corporate
Governance* terhadap *Tax Avoidance*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di
BEI 2013-2016)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

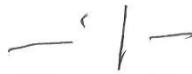
Nama : Dina Artika Andeswari

No. Mahasiswa : 14312380

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal: 23 Agustus 2018

Dosen Pembimbing,



(Hadri Kusuma Prof. Dr., MBA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY RATIO, LEVERAGE,
PERTUMBUHAN PENJUALAN, UKURAN PERUSAHAAN, KONEKSI POLITIK DAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Disusun Oleh : **DINA ARTIKA ANDESWARI**

Nomor Mahasiswa : **14312380**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 17 September 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.

Penguji : Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak, Cert, SAP

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Lverage, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance** (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI 2013–2016)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (SI) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa kepada penulis. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaat serta menjadi teladan bagi penulis
3. Bapak Tri Hardana dan Ibu Suhermaningsih, orang tua penulis yang tak berhenti percaya bahwa anaknya mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa yang tidak pernah putus untuk kedua anaknya serta

tiap tetes keringat dan air mata yang selalu tumpah untuk membahagiakan keluarga kecil ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT serta dapat berkumpul kembali di akhirat nanti.

4. Dana Resfiana, adikku satu-satunya. Ini adalah jawaban atas semua pertanyaanmu setiap kali kita berjumpa di telepon. Terimakasih telah menjadi anak bungsu keluarga ini serta atas banyak hal yang kita lewati bersama
5. Bapak Musyafa Abdul Hakim, guru ngaji yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang agak agamis seperti sekarang ini. Terimakasih saja rasanya tak cukup atas setiap hal yang Bapak berikan untuk penulis sebagai bekal di akhirat nanti.
6. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA. selaku dosen pembimbing dan ketua penguji skripsi yang telah meluangkan waktu serta penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga setiap ilmu dan amal baik yang Bapak berikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
7. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas
8. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
9. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII beserta seluruh jajaran pengajar program studi Akuntansi atas segala ilmu yang penulis peroleh

10. Lee Jinki, Kim Jonghyun, Kim Kibum, Choi Minho serta *uri magna* Lee Taemin. Terimakasih telah lahir ke dunia ini serta tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Terimakasih banyak karena selalu menjadi kekuatan bagi penulis. Ayo jadi lebih bahagia dari sebelumnya
11. Gina Wahyu Murniyana, Hanief Nur Fajriyati, Laela Musdawati, Nanda Cindy Larasati Prihartono, Rafani Adhyapaka Shafira dan Ulfa Fajria Ayub. Teman-temanku yang tetap berada di sisiku meski tahu betapa menyusahkan dan menyedihkannya diriku
12. Reza Yudistira dan Niki Natasya selaku teman *dolan* penulis. Terimakasih karena kalian selalu hadir di waktu yang sangat tepat
13. Mas Ridho, Mas Dul, Mas Dimas, Mas Parto, Mas Scan, Mas Ajiz, Mas Arief, Mas Didim, Mas Irsan, Mas Ageng, Mas Ghifari, Mas Iyus, Mas Reza, Mas Syahru, Mbak Baim, Mbak Restin, Mbak Mimin, Mbak Affi, Mbak Dera, Mbak Ipeh, Mbak Acil, Mbak Rita, Mbak Phalin, Mbak Dyah, Mbak Leyta, Mbak Ambar, Mbak Nafisah serta Mbak Rere. Terimakasih atas arahan, nasihat, bantuan serta dukungan yang tak henti kalian berikan kepada penulis. Terimakasih telah menerima penulis menjadi bagian dari keluarga besar ini
14. Aprik, Mas Dhanu, Mas Alan, Mas Gufron, Rifat, Immel, Rafani, Ulfa, Fenny, Anita, Pradita, Ginola, Debby, serta Indah. Terimakasih atas kesenangan dan kesedihan yang kita bagi bersama selama 16 bulan

15. Taufan, Ilham, Gilang, Fathur, Nabila, Alfi, Madya, Ay, Amel, Rintan, Karina, Adis serta Dewi. Terimakasih telah banyak mendengarkan selama ini.
16. Sad Harimas Tri Sunaryo, Anggi Radysta Pratama, Mayong Nur Savero, Setyo Novianto, Lutfa Rahmawati, Nasyrah Acha, Ageng N Faizah serta Alin Julda Qonita selaku teman KKN PW-163
17. Seluruh dosen dan segenap staf Fakultas Ekonomi atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan
18. Seluruh teman yang menjadi bagian dari hidup penulis, serta yang telah berbagi kenangan bersama penulis. Terimakasih atas segala macam fase kehidupan yang pernah kita buat bersama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sleman, 17 Agustus 2018

Penulis

(Dina Artika Andeswari)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
Berita Acara Ujian Tugas Akhir.....	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Literature Review	13
2.2 Kajian Teori.....	46
2.2.1 Teori Agensi.....	46
2.2.2 Teori Stakeholder	47
2.2.3 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak).....	48
2.3 Hipotesis Penelitian	48
2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	48
2.3.2 Pengaruh <i>Capital Intensity Ratio</i> Terhadap Tax Avoidance	51
2.3.3 Pengaruh Leverage Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	53
2.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	56
2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	57

2.3.6	Pengaruh Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	59
2.3.7	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ...	60
2.4	Kerangka Penelitian	67
BAB III METODE PENELITIAN		68
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	68
3.1.1	Variabel Terikat (Dependent Variable)	69
3.1.2	Variabel Bebas (Independent Variable)	70
3.2	Alat Statistik	76
3.2.1	Metode Analisis Data	76
3.2.2	Analisis Faktor	76
3.2.3	Statistik Deskriptif	78
3.2.4	Analisa Regresi Berganda	79
3.2.5	Pengujian Hipotesis	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		82
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	82
4.2	Analisis Faktor	83
4.3	Statistik Deskriptif	91
4.4	Analisis Korelasi	93
4.5	Pengujian Hipotesis	95
4.6	Pembahasan	96
4.6.1	Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	96
4.6.2	Pengaruh <i>Capital Intensity Ratio</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	98
4.6.3	Pengaruh Leverage Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	99
4.6.4	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	101
4.6.5	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	102
BAB V PENUTUP		105
5.1	Kesimpulan	105
5.2	Implikasi Penelitian	106
5.3	Keterbatasan Penelitian dan Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012 – 2016	14
Table 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	82
Tabel 4.2 KMO dan BARTLETT’S TEST	83
Tabel 4.3 Nilai KMO	84
Tabel 4.4 Nilai KMO	85
Tabel 4.5 Nilai KMO	86
Tabel 4.6 Nilai KMO	87
Tabel 4.7 Nilai KMO	88
Tabel 4.8 Nilai KMO	89
Tabel 4.9 Nilai KMO	89
Tabel 4.10 Rotated Component Matrix	90
Tabel 4.11 Hasil Statistik Deskriptif	92
Tabel 4.12 Hasil Uji Korelasi	94
Tabel 4.13 Hasil <i>Generalized Linear Model</i> (GLM)	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	67
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan Properti dan Real Estate	116
Lampiran 2 : Data <i>Cash Effective Tax Rate</i> 2013-2016	118
Lampiran 3 : Data <i>Effective Tax Rate</i> 2013-2016	120
Lampiran 4 : Data Tax Avoidance 2013-2016	122
Lampiran 5 : Data Profitabilitas 2013-2016	124
Lampiran 6 : Data <i>Capital Intensity Ratio</i> 2013-2016	126
Lampiran 7 : Data <i>Leverage</i> 2013-2016	128
Lampiran 8 : Data Ukuran Perusahaan 2013-2016	130
Lampiran 9 : Data <i>Good Corporate Governance</i> 2013-2016	132
Lampiran 10 : Hasil <i>Generalized Linear Model</i> (GLM)	134

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *capital intensity ratio*, leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, koneksi politik dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah berasal dari perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013–2016. Teknik pengambilan sampel adalah metode purposive sampling dengan jenis data sekunder yang menghasilkan sampel sebanyak 42 perusahaan. Metode analisis data menggunakan analisis faktor, analisis statistik deskriptif dan analisis *Generalized Linear Model* (GLM). Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage serta ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Good corporate governance* (GCG) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan *capital intensity ratio* (CIR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan serta koneksi politik tidak memenuhi syarat kecukupan data pada analisis faktor.

Kata Kunci : profitabilitas, *capital intensity ratio*, leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, koneksi politik, *good corporate governance*, penghindaran pajak

ABSTRACT

Tax avoidance is a legal act by utilizing loopholes from the Tax Law to minimize the income tax burden that should be paid. This study aims to analyze the effect of profitability, capital intensity ratio, leverage, sales growth, company size, political connections, and good corporate governance on tax avoidance. The populations in this study were from property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2013-2016 period. The sampling gathering technique used purposive sampling method with secondary data types that produce samples that consist of 42 companies. Data analysis method used factor analysis, descriptive statistical analysis and analysis of Generalized Linear Model (GLM). These results indicate that profitability, leverage and firm size have positive effect on tax avoidance. Good corporate governance (GCG) has negative effect on tax avoidance and capital intensity ratio (CIR) has no effect on tax avoidance, while sales growth and political connection do not fulfill the data adequacy requirements on factor analysis.

Keywords : profitability, capital intensity ratio, leverage, sales growth, company size, political connection, good corporate governance, tax avoidance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan selaku wajib pajak merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia serta menjadi tiang penopang untuk kelancaran perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Melalui pajak penghasilan, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama Indonesia. Berdasarkan APBN 2018, penerimaan pajak ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.618,1 T atau 85,4% dari total Rp 1.894,7 T. Pajak yang diperoleh sebagai pendapatan negara pada dasarnya akan diperlukan untuk menyokong kesejahteraan rakyat seperti mendukung sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana lainnya. Dalam rangka pemenuhan kesejahteraan rakyat tersebut tentu ketersediaan dana oleh pemerintah sangat dibutuhkan. Melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan sektor pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S - 14/PJ.7/2003,2003). Namun optimalisasi pendapatan negara di sektor perpajakan sering kali menemukan kendala, salah satunya yakni praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Bagi suatu perusahaan, keberadaan pajak dianggap mengakibatkan masalah terkait pendapatan. Hal ini disebabkan pajak akan mengurangi pendapatan perusahaan, sehingga perusahaan cenderung memperkecil beban pajak. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya semimumimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Kasus penghindaran pajak sendiri telah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar baik di Indonesia maupun luar Indonesia. Seperti perusahaan Google yang menurut Yusuf (2016) telah menghindari pajak senilai 2,4 miliar dollar AS (Rp 31 triliun) pada 2014 dengan memindahkan pendapatan senilai 12 miliar dollar AS (Rp 157 triliun) ke sebuah perusahaan penampung di Bermuda. Pendapatan yang dipindahkan tersebut merupakan keuntungan dari perusahaannya di Belanda. Strategi pajak ini diduga dilakukan perusahaan agar hanya membayar pajak 6% dari keuntungan karena tingkat pajak di Irlandia yang relatif rendah. Selain Google terdapat pula Starbucks terlibat dalam skandal penghindaran pajak pada tahun 2012 dan 2015. Investigasi mengungkapkan bahwa Starbucks telah memangkas pembayaran pajaknya hingga 30 juta euro sejak 2008, perusahaan hanya membayar pajak penghasilan 2,6 juta euro di Belanda atau kurang dari 1% dari keuntungan sebelum pajak sebesar 407 juta euro.

Sedangkan di Indonesia sendiri, praktik penghindaran pajak pernah terjadi dalam kasus simulator SIM pada tahun 2013 di mana terdapat penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa seharga Rp7,1 miliar di Semarang, namun pada akta notaris hanya tertulis Rp940 juta atau ada selisih harga Rp6,1 miliar. Berdasarkan transaksi tersebut ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor sebesar 10 persen dari Rp6,1 miliar atau Rp610 juta serta PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dari Rp6,1 miliar atau Rp300 juta. Maka total kekurangan pajak senilai Rp910 juta Suryana (2013). Menurut Tambunan (2015), maraknya bisnis properti di masyarakat mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang sangat menjanjikan. Hal ini menimbulkan

dugaan masih banyaknya penghindaran pajak yang terjadi pada sektor properti. Potensi yang menjanjikan tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan sektor properti sebagai salah satu prioritas penggalan potensi pajak sejak tahun 2013.

Berdasarkan kasus–kasus praktik penghindaran pajak yang pernah terjadi tersebut, menunjukkan bahwa praktik ini telah dilakukan oleh perusahaan dari berbagai sektor tak terkecuali pada sektor properti dan real estate. Hal ini menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama pada perusahaan properti dan real estate yang telah terdaftar dalam BEI (Bursa Efek Indonesia). Selain itu tidak banyak penelitian yang menggunakan perusahaan properti dan real estate sebagai populasi penelitian. Pemilihan perusahaan pada sektor ini juga didasarkan pada aktivitas usahanya yang sebagian besar terkait dengan perpajakan. Pada 5 tahun terakhir sektor ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik walaupun tren pertumbuhannya melambat, searah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional (fiskal.kemenkeu.go.id, 2016). Akan tetapi, sektor properti dianggap akan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2018 (Prabowo, 2017).

Penelitian terkait penghindaran pajak telah dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Chen et al. (2010); Damayanti dan Susanti (2015); Darmawan dan Sukartha (2014) N. L. P. P. Dewi dan Noviari (2017); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Ozkan (2001); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Singly dan Sukartha (2015);

Utari dan Supadmi (2017); Winata (2014); serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Penelitian–penelitian tersebut menunjukkan bahwa tax avoidance atau penghindaran pajak disebabkan oleh banyak faktor yang menyebabkan perbedaan hasil penelitian.

Faktor profitabilitas berupa *Return On Asset* (ROA) telah diteliti oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017) serta Utari dan Supadmi (2017) menunjukkan hasil yang tidak konsisten. *Capital intensity ratio* yang diteliti oleh Putra dan Merkusiwati (2016) serta Dharma dan Noviari (2017) menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Singly dan Sukartha (2015) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) yang melakukan penelitian pada ukuran perusahaan juga tidak konsisten hasilnya. Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Ozkan (2001); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Singly dan Sukartha (2015) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) meneliti leverage yang hasilnya tidak konsisten.

Pertumbuhan penjualan yang diteliti Dewinta dan Setiawan (2016) serta Singly dan Sukartha (2015) hasilnya tidak konsisten. Faktor *Good Corporate*

Governance (GCG) berupa Komisaris independen diteliti oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Utari dan Supadmi (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017) serta Winata (2014) hasilnya tidak konsisten. Kepemilikan institusional yang diteliti oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017) serta Winata (2014) hasilnya tidak konsisten. Komite audit diteliti oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Praditasari dan Setiawan (2017); Swingly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017) serta Winata (2014) menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Koneksi politik oleh Lestari dan Putri (2017) serta Utari dan Supadmi (2017) memberikan hasil yang tidak konsisten.

Maka bersumber pada penelitian–penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemungkinan penyebab terjadinya inkonsistensi hasil penelitian ialah adanya indikator–indikator yang berbeda juga. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang menggunakan faktor profitabilitas terdapat indikator berupa *Return on Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM) dan *Gross Profit Margin* (GPM). Indikator *Return on Asset* (ROA) didasarkan pada penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviani (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017); serta Utari dan Supadmi (2017). Indikator *Return On Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM) oleh penelitian

Susilowati dan Turyanto (2011), sedangkan *Gross Profit Margin* (GPM) dari penelitian Agustina (2012).

Pada faktor leverage menggunakan indikator *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Equity Ratio*. Indikator *Debt to Asset Ratio* (DAR) diteliti oleh Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Lestari dan Putri (2017); serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); serta Singly dan Sukartha (2015). Sedangkan *Long Term Debt to Equity Ratio* digunakan oleh penelitian Putri (2012).

Penggunaan indikator pengukuran pada faktor ukuran perusahaan juga berbeda-beda yakni total aset, log total aset, log natural total aset, penjualan serta jumlah karyawan. Indikator total aset digunakan pada penelitian Dewi dan Wirajaya (2013), sedangkan log total aset pada penelitian Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); serta Praditasari dan Setiawan (2017). Log natural total aset pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Liu dan Cao (2007); Ozkan (2001); Putra dan Merkusiwati (2016); serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Penjualan dan jumlah karyawan pada penelitian Hackston dan Milne (1996).

Pada faktor *good corporate governance* (GCG) juga menggunakan beberapa indikator yang berbeda yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga.

Indikator komisaris independen digunakan oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Utari dan Supadmi (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017); dan Winata (2014). Kepemilikan institusional pada penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017); serta Winata (2014). Indikator komite audit digunakan oleh peneliti Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Praditasari dan Setiawan (2017); Singly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017); serta Winata (2014). Kepemilikan manajerial sesuai dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) serta kepemilikan keluarga atas penelitian Rebecca dan Siregar (2012)

Namun selain itu terdapat juga faktor yang hanya dapat diukur dengan satu indikator saja seperti faktor *Capital Intensity Ratio* yang juga menggunakan indikator *Capital Intensity Ratio* (CIR) pada penelitian Putra dan Merkusiwati (2016); serta Dharma dan Noviari (2017). Faktor pertumbuhan penjualan yang menggunakan indikator rasio pertumbuhan berdasarkan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) serta Singly dan Sukartha (2015). Serta koneksi politik yang menggunakan indikator dummy sesuai penelitian Lestari dan Putri (2017).

Tidak hanya itu, pada variabel dependen berupa *tax avoidance* atau penghindaran pajak juga terjadi perbedaan indikator berupa *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Effective Tax Rate* (ETR). Indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menjadi yang paling sering digunakan sesuai pada penelitian oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Chen et al.

(2010); Damayanti dan Susanti (2015); N. L. P. P. Dewi dan Noviari (2017); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Ozkan (2001); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Singly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017) serta Winata (2014). Indikator *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Liu dan Cao (2007) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017).

Penggunaan indikator yang berbeda tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya inkonsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Perlu adanya alat ukur tunggal untuk mengatasi kelemahan tersebut, oleh sebab itu penulis menggunakan metode analisis faktor untuk mengetahui indikator yang tepat digunakan dalam faktor profitabilitas, *capital intensity ratio*, leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, koneksi politik dan *good corporate governance* (GCG). Hasil pengukurannya akan digunakan dalam rangka menguji pengaruh faktor–faktor tersebut terhadap *tax avoidance*. Sehingga judul pada penelitian ini adalah “**Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance**” pada perusahaan sektor propertin dan real estate yang terdaftar dalam BEI tahun 2013–2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3) Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4) Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 5) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 6) Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 7) Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
- 2) Menganalisis pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*
- 3) Menganalisis pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*
- 4) Menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*
- 5) Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

- 6) Menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*
- 7) Menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, *capital intensity ratio*, leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, koneksi politik dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang merupakan pengembangan dari penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Chen et al. (2010); Damayanti dan Susanti (2015); Darmawan dan Sukartha (2014) N. L. P. P. Dewi dan Noviari (2017); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Ozkan (2001); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Singly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017); Winata (2014); serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) sehingga penelitian ini dapat memberikan kontrol dan pengawasan atas perilaku perusahaan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan terutama dalam sektor properti dan real estate dalam pelaksanaan

serta pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat terhindar dari praktik penghindaran pajak dan peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah. Selain itu juga agar dapat digunakan oleh pemerintah guna membuat kebijakan perpajakan, dalam rangka meminimalisir praktik penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini memberikan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memaparkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini memaparkan terkait literatur review, kajian teori, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memaparkan terkait populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variable penelitian dan pengukuran variable, dan metode analisis data yang akan digunakan untuk pengujian data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memaparkan terkait deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini memaparkan terkait kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan perubahan ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 yakni pada UU No. 28 tahun 2007. Membayar pajak yang menjadi kewajiban bagi rakyat kepada pemerintah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Hingga saat ini pajak masih menjadi sumber pendapatan utama Indonesia selain penerimaan negara bukan pajak serta hibah. Hal ini termaktub dalam APBN 2018 yang menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 T atau 85,4% dari total Rp 1.894,7 T. Angka ini ditingkatkan dari *outlook* APBN 2017 yakni Rp 1.472,7 T atas penerimaan pajak, yang ditargetkan Rp 1.498,9 T. Sedang pajak penghasilan menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak yang disebabkan oleh faktor lain berupa perbaikan pertumbuhan ekonomi serta kebijakan tax amnesty. Terkait dengan realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

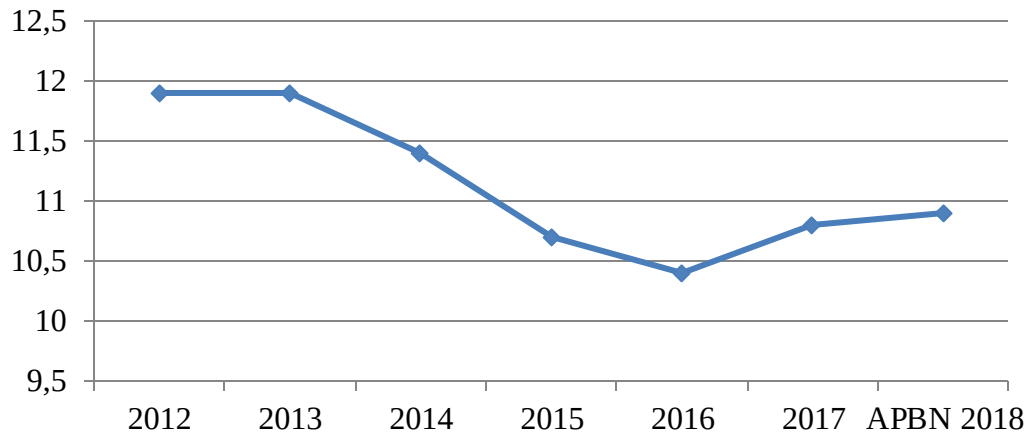
Tabel 2.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012 – 2016
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2012	980.518,10	351.804,70
2013	1.077.306,70	354.751,90
2014	1.146.865,80	398.590,50
2015	1.240.418,86	255.628,48
2016	1.539.166,20	245.083,60
2017	1.495.893,80	240.362,90

Sumber : www.bps.go.id (diakses 12 April 2018)

Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi pajak bergerak secara signifikan dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun begitu jika dilihat dari rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) tahun 2017 yang hanya berada di level 10,8% membuktikan bahwa penerimaan pajak di Indonesia sejatinya belum maksimal. Rasio ini tercatat menjadi yang terendah di dunia, bahkan jika dibandingkan dengan negara di Asia sekalipun. Capaian *tax ratio* negara lain masih terpaut jauh di atas Indonesia, seperti Jepang 28,3%, Thailand 17%, Malaysia 15,5%, Filipina 14,4% serta Vietnam 13,8%. Indonesia hanya sedikit di atas Kamboja 8% juga Birma 4,9% (Edward, 2018). Padahal Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam hal penerimaan pajak karena besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB ditargetkan sebesar 10,9% pada tahun 2018 seperti uraian pada grafik berikut.

Tax Ratio (%)



Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak di Indonesia yang diperoleh dari laba perusahaan itu sendiri. Sehingga keberadaan pajak dianggap menimbulkan permasalahan pada penghasilan, akibat mengurangi pendapatan maka perusahaan berusaha untuk memperkecil beban pajak. Usaha ini dapat dilakukan melalui dua cara berupa legal dan ilegal yang justru dapat menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini perlu adanya inisiatif WP, selain itu kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan WP. Kelemahan dari sistem perpajakan ini, dapat menimbulkan adanya pelanggaran perpajakan berupa upaya untuk menghindari atau melawan pajak (Mulyani, Darminto, dan

N.P, 2014). Upaya melawan pajak dapat dilakukan dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak merupakan upaya perlawanan pajak dengan cara mengurangi pajak terutang melalui cara legal, sedangkan penggelapan pajak adalah usaha perlawanan pajak dengan cara mengurangi pajak terutang melalui cara ilegal (Xynas, 2011). Berdasarkan penyidik IMF tahun 2016 yang telah di analisa kembali oleh Universitas PBB, Indonesia telah mencatat namanya pada peringkat 11 dari 30 negara dengan penghindaran pajak perusahaan. Sehubungan dengan data tersebut diperkirakan terdapat 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia (Susilo, 2017).

Menurut Makhfatih (2005) menyatakan bahwa faktor penyebab praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kurangnya pendidikan, kinerja pemerintah, rendahnya pengawasan, serta rendahnya *law enforcement*. Sedangkan faktor eksternal berupa regulasi yang menjadi salah satu cara bagi pemerintah dalam upaya mengatasi adanya praktik dalam sektor pajak untuk menyelamatkan penerimaan negara. Penghindaran pajak dapat diproksikan melalui dua cara yakni dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Effective Tax Rate* (ETR). CETR dianggap tidak berpengaruh terhadap perubahan estimasi. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan,

sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan (Yoehana, 2013).

Melalui penelitian terhadap penghindaran pajak yang pernah dilakukan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak diantaranya sebagai berikut. Faktor profitabilitas berupa *Return On Asset* (ROA) telah diteliti oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017) serta Utari dan Supadmi (2017). *Capital intensity ratio* diteliti oleh Putra dan Merkusiwati (2016) serta Dharma dan Noviari (2017). Ukuran perusahaan diteliti oleh Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Singly dan Sukartha (2015) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Leverage diteliti oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Ozkan (2001); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Singly dan Sukartha (2015) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Umur perusahaan oleh Dewinta dan Setiawan (2016). Pertumbuhan penjualan oleh

Dewinta dan Setiawan (2016) serta Singly dan Sukartha (2015). Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) berupa skor CGPI oleh Darmawan dan Sukartha (2014); Lestari dan Putri (2017) serta Nugrahitha dan Suprasto (2018). Komisaris independen diteliti oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Utari dan Supadmi (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017) serta Winata (2014). Kepemilikan institusional diteliti oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017) serta Winata (2014). Komite audit diteliti oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Praditasari dan Setiawan (2017); Singly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017) serta Winata (2014). *Corporate social responsibility* (CSR) yang diteliti oleh Dewi dan Noviari (2017) juga Dharma dan Noviari (2017). Koneksi politik oleh Lestari dan Putri (2017) serta Utari dan Supadmi (2017). Karakter eksekutif diteliti oleh Damayanti dan Susanti (2015); Nugrahitha dan Suprasto (2018) serta Singly dan Sukartha (2015). Kualitas audit telah diteliti oleh Damayanti dan Susanti (2015) serta Winata (2014).

Faktor Profitabilitas

Profitabilitas merupakan perbandingan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja keuangan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba (Praditasari dan Setiawan, 2017). Dengan begitu nilai profitabilitas akan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama

periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan beberapa rasio salah satunya *return on asset* (ROA) yang berkaitan erat dengan laba perusahaan serta pajak penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh perusahaan juga makin meningkat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa performa keuangan perusahaan dinilai baik. Maka perusahaan diasumsikan tidak melakukan tindak penghindaran pajak, karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Menurut penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Damayanti dan Susanti (2015); Chen et al. (2010); serta Utari dan Supadmi (2017) profitabilitas berpengaruh signifikan negatif, berarti tingginya nilai profitabilitas membuat kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Hal ini bertentangan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); serta Praditasari dan Setiawan (2017) yang justru menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas yang didapat maka semakin tinggi pula kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan menurut Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) serta Nugrahitha dan Suprasto (2018) bahkan menemukan tidak adanya pengaruh atas profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Faktor *Capital Intensity Ratio*

Capital intensity ratio dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan, faktor ini dapat menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut Waluyo dan Kearo (2002) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap oleh perusahaan akan memunculkan keberadaan biaya depresiasi setiap tahunnya yang mana dapat dimanfaatkan dalam mengurangi pembayaran pajak. Biaya depresiasi akan digunakan oleh manajer guna meminimumkan beban pajak perusahaan yang seharusnya. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Darmadi, 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dimaknai bahwa semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan penghindaran pajak perusahaan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviri (2017) yang menemukan adanya pengaruh signifikan positif atas *capital intensity ratio* terhadap penghindaran pajak. Sehingga perusahaan dengan tingkat aset tetap tinggi memiliki beban pajak yang rendah dikarenakan pemotongan pajak oleh adanya biaya depresiasi setiap tahun. Oleh sebab itu, tingginya *capital intensity ratio* juga menunjukkan tingginya kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindak penghindaran pajak sebagai akibat dari munculnya biaya depresiasi. Hal ini

berbeda dengan temuan Putra dan Merkusiwati (2016) yang tidak menemukan adanya pengaruh atas *capital intensity ratio* terhadap penghindaran pajak.

Faktor Ukuran Perusahaan

Wajib pajak terdiri atas orang pribadi dan badan, perusahaan merupakan salah satunya. Sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak, selain itu juga menjadi faktor yang menyebabkan tindak penhindaran pajak. Machfoedz (1994) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil. Perusahaan yang dikelompokkan dalam ukuran besar dinilai lebih mampu atau stabil dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan berukuran kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka makin stabil kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Munculnya laba yang tinggi, akan dibarengi dengan makin tingginya beban pajak yang diperoleh perusahaan. Oleh sebab itu guna menghindari pengeluaran yang besar akibat beban pajak tinggi, perusahaan dengan ukuran besar akan tinggi kecenderungannya dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Dewinta dan Setiawan (2016); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); serta Singly dan Sukartha (2015) mendukung bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif. Hal ini dapat dimaknai bahwa ukuran perusahaan yang besar juga menentukan besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Namun pada penelitian Dewi dan Noviari (2017) dan Praditasari dan Setiawan (2017) justru menemukan hasil yang berbeda, bahwa ukuran perusahaan memberi pengaruh signifikan negatif. Perusahaan yang kecil dianggap belum mampu mengelola beban pajaknya secara optimal, sebab minimnya keahlian di bidang tersebut. Sehingga menekan kemungkinan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menemukan tidak adanya pengaruh atas ukuran perusahaan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Faktor Leverage

Leverage merupakan perbandingan yang mencerminkan besarnya utang perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan menyebabkan bertambahnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak, sehingga dapat diartikan bahwa beban bunga yang tinggi menunjukkan laba yang semakin rendah. Apabila hal ini terjadi maka perusahaan dengan perolehan laba yang rendah, semakin kecil kemungkinan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Leverage sendiri dapat dihitung menggunakan dua cara yakni *debt to asset ratio* (DAR) untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sedangkan *debt to equity ratio* (DER) menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

1) *Debt to asset ratio (DAR)*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviani (2017); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); serta Ozkan (2001) turut menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai leverage akan menunjukkan utang yang tinggi juga, maka dari itu beban pajak perusahaan akan berkurang sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Berbeda dengan penelitian oleh (Wijayanti dan Merkusiwati 2017) yang justru menunjukkan adanya pengaruh positif. Tingginya nilai leverage akan menentukan perolehan intensif pajak atas beban bunga bagi perusahaan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak. Seiring dengan meningkatnya *leverage* akibat dari munculnya insentif pajak, maka perusahaan tersebut cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Sedangkan menurut Dewinta dan Setiawan (2016), leverage tidak memiliki berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2) *Debt to equity ratio (DER)*

Berdasarkan temuan Ariawan dan Setiawan (2017) serta Swingly dan Sukartha (2015) meyakinkan bahwa leverage DER memiliki pengaruh negatif. Semakin tinggi rasio *leverage* maka akan semakin tinggi jumlah hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Sehingga semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul, hal ini membuat berkurangnya beban pajak

perusahaan serta kemungkinan terjadinya tindak penghindaran pajak akan semakin rendah. Hal ini berbeda dengan temuan Ariawan dan Setiawan (2017); Nugrahitha dan Suprasto (2018) serta Praditasari dan Setiawan (2017) leverage justru memiliki pengaruh signifikan positif yakni bahwa nilai utang perusahaan (DER) yang tinggi dapat menimbulkan rendahnya nilai CETR perusahaan. Semakin rendah nilai CETR suatu perusahaan akan menyebabkan makin tingginya kecenderungan perusahaan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Darmawan dan Sukartha (2014) serta Putra dan Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa leverage DER tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor Umur Perusahaan

Umur perusahaan dikaitkan dengan seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di dunia usaha, faktor ini dinilai dapat mempengaruhi adanya aktivitas *tax avoidance*. Sebab pada saat perusahaan telah memutuskan untuk *go public* dan terdaftar di BEI, maka perusahaan juga diharuskan mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat juga pemakai laporan keuangan agar informasi di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak yang memerlukan.

Menurut Loderer dan Waelchli (2010) melalui jurnalnya yang berjudul “*Firm Age dan Performance*” memaparkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang mengalami

penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi. Hal ini juga disetujui oleh penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menemukan adanya hubungan signifikan positif atas umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. Melalui hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tua umur perusahaan maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Faktor Pertumbuhan Penjualan

Penjualan oleh perusahaan dapat dilakukan atas adanya harta atau aset, sehingga penjualan memberikan pengaruh strategis terhadap perusahaan. Apabila penjualan perusahaan tersebut ditingkatkan maka keberadaan aset juga harus ditambah. Optimalisasi sumber daya perusahaan yang dilakukan dengan baik dapat dilihat melalui penjualan yang dilakukan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan dianggap mampu menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan karena melalui pertumbuhan penjualan juga, perusahaan dapat memprediksi besaran profit yang nantinya akan diperoleh. Peningkatan pertumbuhan penjualan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, sehingga akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang juga menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor Skor CGPI

Salah satu proksi atau pengukuran atas *Good Corporate Governance* (GCG) yakni menggunakan *corporate governance perception index* (CGPI) yang menunjukkan peringkat indeks terbaik diantara perusahaan. Penelitian oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menemukan bahwa penerapan *corporate governance* oleh CGPI yang tinggi, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh kualitas dari *corporate governance* yang baik menjadikan perilaku perusahaan bersifat non-agresif dalam mengelola pajak terutang dengan bertujuan sebagai upaya peningkatan pendapatan perusahaan serta meningkatkan pengembalian kepada investor. Hal ini didukung oleh penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menemukan hubungan CGPI berhubungan signifikan dengan arah negatif pada *tax avoidance*. Namun hasil tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Lestari, dan Putri (2017) serta Nugrahitha dan Suprasto (2018) yang menyatakan bahwa skor CGPI berpengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Melalui hasil uji statistik yang telah dilakukan tersebut memiliki arti bahwa skor CGPI yang semakin tinggi, mengakibatkan nilai CETR semakin rendah. Hal ini berarti

semakin tinggi CGPI maka keagresifan pajak semakin tinggi. Pengambilan keputusan perusahaan yang agresif dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam penghindaran pajak, sehingga semakin tinggi agresifitas pajak akan meningkatkan peluang perusahaan untuk menghindari pajak.

Faktor Komisaris Independen

Pelaksanaan GCG tidak lepas dari keberadaan organ perusahaan seperti, rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris yang menjadi bagian di dalamnya. RUPS berkontribusi kepada *shareholder* dalam memutuskan kebijakan mengenai modal yang ditanam dalam perusahaan yang harus tetap memerhatikan peraturan mengenai anggaran dasar serta memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anggota dewan komisaris perusahaan dilakukan pada saat berlangsungnya RUPS yang nantinya bertugas mengontrol serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dapat terbentuk dari komisaris yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang biasa disebut sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Salah satu dari seluruh anggota dewan komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan harus memiliki latar belakang pendidikan mengenai keuangan atau akuntansi (KNKG, 2006).

Komisaris independen dapat diartikan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan atau tidak terafiliasi dengan anggota direksi di perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya serta pemegang saham mayoritas perusahaan (Praditasari dan Setiawan, 2017). Berdasarkan ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa

keberadaan komisaris independen akan dikaitkan dengan transparansi, akuntabilitas, keadilan serta pertanggung jawaban. Sehingga beriringan dengan keberadaan komisaris independen sesuai fungsinya, maka tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan menurun. Meningkatnya jumlah dewan komisaris independen, dapat menekan kemungkinan perusahaan melakukan tindak *tax avoidance*.

Selaras dengan hal tersebut, penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menemukan adanya pengaruh negatif. Komisaris independen dinilai mampu menjalankan fungsi kontrol dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi serta memperketat pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi. Sehingga membuat aktivitas pengurangan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan dalam upaya penghindaran pajak dapat diminimalkan. Lain halnya dengan penelitian Putra dan Merkusiwati 2016 serta Winata (2014) yang justru menunjukkan pengaruh signifikan positif yang berarti semakin banyak komisaris yang berasal dari luar perusahaan makin kurang efektif pengawasan dan pengendalian kinerja direksi atau manajer dalam pengelolaan perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017) serta Utari dan Supadmi (2017) justru tidak menemukan adanya pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Faktor Kepemilikan Institusional

Dalam setiap perusahaan, masing-masing pihak memiliki kepentingannya sendiri sehingga untuk mencegah terjadinya konflik antar pihak tersebut perlu adanya pengawasan dari pihak luar perusahaan. Pihak luar yang dimaksud di sini ialah kepemilikan institusional yang berarti kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor (N. N. K. Dewi dan Jati, 2014). Dalam penelitian Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional akan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa manajemen perusahaan dalam membuat keputusannya akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Keberadaan pemilik institusional berfungsi penting dalam meningkatkan pengawasan agar lebih optimal sebab dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajemen secara efektif. Dengan begitu tingginya tingkat kepemilikan institusional dapat menyebabkan semakin tingginya tingkat pengawasan terhadap manajemen. Hal ini mampu mengurangi konflik kepentingan antar manajemen, sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan meminimalkan peluang terjadinya penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) membenarkan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan menurut Ariawan dan Setiawan (2017) keberadaan kepemilikan institusional yang tinggi justru meningkatkan kecenderungan

perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Sehingga penelitian tersebut membenarkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif. Perusahaan yang kepemilikan institusionalnya tinggi justru semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan pajak, sehingga meningkatkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Lain halnya dengan Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut juga berbeda dengan penelitian Utari dan Supadmi (2017), Wijayanti dan Merkusiwati (2017) serta Winata (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. Menurut Isnanta (2008) dalam Winata (2014), hal ini disebabkan oleh terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap yang memenuhi kepentingan pribadinya.

Faktor Komite Audit

Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh beberapa komite, salah satunya komite audit yang bertujuan membantu dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan. Agar laporan keuangan perusahaan disusun dan disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu struktur pengawasan internal perusahaan harus dilakukan secara benar dan baik, penerapan audit internal serta eksternal dilakukan dengan berdasarkan standar audit yang berlaku umum, dan adanya

tindakan atas temuan hasil audit yang dilakukan oleh para manajemen perusahaan (KNKG, 2006).

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh perusahaan yang memiliki tujuan dalam hal melaksanakan proses pengawasan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang bertujuan untuk menekan tindakan kecurangan oleh manajemen perusahaan (Praditasari dan Setiawan, 2017). Sehingga keberadaan komite audit yang pada dasarnya bertugas sebagai pengawas akan dapat mengecilkan kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan bahwa meningkatnya jumlah komite audit, dapat menekan kemungkinan perusahaan melakukan tindak *tax avoidance*.

Kemungkinan tersebut senada dengan penelitian oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017) serta Winata (2014) bahwa pengaruh signifikan negatif. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi jumlah anggota komite audit membuat kecenderungan perusahaan dalam melakukan tindak penghindaran pajak juga semakin kecil. Lain halnya dengan Damayanti dan Susanti (2015); Swingly dan Sukartha (2015) serta Utari dan Supadmi (2017) yang justru menemukan bahwa hubungan antara komite audit dengan penghindaran pajak sama sekali tidak memiliki pengaruh.

Faktor *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Holme dan Watts (2006), *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis,

berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap perolehan laba saja, tetapi juga perlu memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Secara umum, perusahaan dituntut agar mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*, dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* melalui pemerintah.

Berdasarkan Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih untuk mensiasati pengenaan pajak, sehingga semua biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan CSR dapat dibebankan sebagai biaya agar dapat mengurangi laba kena pajak. Perusahaan berperingkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial, sehingga dapat melakukan strategi pajak yang agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin rendah penerapan CSR dalam perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki tanggung jawab sosial, maka peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak semakin tinggi begitu juga sebaliknya. Hal ini disepakati oleh penelitian Dewi dan Noviari (2017) serta Dharma dan Noviari (2017) yang juga menemukan adanya pengaruh signifikan negatif atas CSR terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan CSR akan menunjukkan rendahnya upaya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Faktor Koneksi Politik

Politik senantiasa berhubungan erat dengan dunia bisnis. Adanya koneksi politik diharapkan dapat memberi manfaat yang sama baik terhadap pemerintah atau politisi maupun perusahaan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mampu melakukan manajemen pajak dengan lebih agresif karena mendapat perlindungan dari pemerintah atau politisi. Apabila hal ini terjadi maka akan menyebabkan kurangnya transparansi laporan keuangan perusahaan. Padahal kurangnya transparansi laporan keuangan dapat berakibat negatif pada perusahaan, seperti tingginya kebutuhan modal karena minimnya pemodal atau investor.

Leuz dan Oberholzer-gee (2006) menyatakan perusahaan harus mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan bisnisnya agar dapat menyusun strategi bersaing yang baik. Salah satu peluang yang dimaksud ialah melalui koneksi politik yang harus dimanfaatkan agar perusahaan dapat meningkatkan dan memperluas jaringan yang memberikan keuntungan. Berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik garis lurus, bahwa semakin tinggi koneksi politik suatu perusahaan maka akan semakin tinggi kecurangan yang dilakukan melalui penghindaran pajak. Sebab hubungan politik yang dimiliki oleh perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap kegiatan perusahaan itu sendiri. Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian menurut Utari dan Supadmi (2017) yang menemukan adanya pengaruh positif atas koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Namun hal tersebut justru bertentangan dengan penelitian Lestari dan Putri (2017) yang menemukan tidak adanya pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kedekatan yang terjadi

antara perusahaan dengan pemerintah justru dianggap mampu membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Penghargaan yang sering kali diberikan oleh pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Faktor Karakter Eksekutif

Setiap perusahaan pasti memiliki pemimpin yang berada di posisi teratas baik sebagai top eksekutif maupun top manajer. Setiap individu pemimpin memiliki karakter masing-masing dalam memberikan arahan terhadap bawahannya. Terdapat dua jenis karakter eksekutif dalam perusahaan yakni *risk taker* dan *risk averse*. Risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* (Paligorova, 2010).

Menurut Coles, Daniel, dan Naveen (2004) menyatakan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* (kebijakan) yang diambil oleh pemimpin perusahaan. kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan karakter mereka, apakah berupa *risk taking*

atau *risk averse*. Semakin tinggi risiko perusahaan yang diambil maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, begitu juga dengan semakin rendah risiko perusahaan maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* lebih berani dalam mengambil risiko berbisnis, semakin tinggi risiko yang diambil maka keuntungan yang diperoleh juga makin tinggi. Sedangkan eksekutif berkarakter *risk averse* akan memiliki kecenderungan untuk sebisa mungkin menghindari segala macam kesempatan yang menimbulkan risiko.

Paligorova (2010) mengukur risiko perusahaan menggunakan persamaan standar deviasi dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation dan Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Tinggi rendahnya risiko perusahaan akan menunjukkan kecondongan karakter eksekutif. Semakin tinggi risiko eksekutif maka akan menunjukkan bahwa eksekutif bersifat *risk taker*, hal ini menyebabkan semakin tingginya kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan. Sebab tindakan ini akan mendatangkan banyak keuntungan baik bagi pemimpin perusahaan maupun perusahaan itu sendiri, begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahitha dan Suprasto (2018), Swingly dan Sukartha (2015) serta Damayanti dan Susanti (2015) yang juga menunjukkan adanya hubungan signifikan positif atas karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Faktor Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan

yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (N. N. K. Dewi dan Jati, 2014). Hal terpenting dalam pelaksanaan audit adalah adanya transparansi yang juga menjadi salah satu unsur dari *good corporate governance*. Penilaian transparansi yang juga sekaligus digunakan dalam pengukur kualitas audit dapat dilakukan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water House Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit KAP *Non The Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Semakin berkualitas audit suatu perusahaan, akan meminimalkan kecenderungan manipulasi pajak oleh perusahaan yang biasanya dilakukan demi mengurangi beban pajak. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi kualitas audit maka semakin rendah peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanti (2015) yang menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* memang cenderung dipercaya reputasi KAP yang baik, namun jika perusahaan dapat memberi keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik terhadap KAP yang mempunyai reputasi yang baik, bisa saja KAP tersebut melakukan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan KAP, seperti halnya kasus Enron tahun 2004 (Fadhilah, 2014).

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya konsistensi pada beberapa faktor seperti umur perusahaan dalam penelitian Dewinta dan Setiawan (2016), faktor *corporate social responsibility* (CSR) dalam penelitian Dewi dan Noviari (2017) serta Dharma dan Noviari (2017), faktor karakter eksekutif dalam penelitian Damayanti dan Susanti (2015); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Singly dan Sukartha (2015). Hasil–hasil tersebut terbukti secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan berdasar pada hasil penelitian Damayanti dan Susanti (2015) serta Winata (2014) pada faktor kualitas audit, menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya juga terdapat faktor yang menunjukkan inkonsistensi, hal ini disebabkan karena beberapa penelitian ada yang mendukung dan tidak mendukung faktor yang berpengaruh terhadap tax avoidance. Seperti penggunaan proksi yang berbeda yakni CETR dan ETR pada faktor dependen *tax avoidance*. Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menjelaskan bahwa pengukuran CETR digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*, bahwa semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); N. L. P. P. Dewi dan Noviari (2017); Lestari dan Putri (2017); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Singly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi

(2017) serta Winata (2014). Sedangkan penelitian Chen et al. (2010); Darmawan dan Sukartha (2014); Liu dan Cao (2007) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menggunakan proksi ETR. Hasil dari penelitian lain yang juga inkonsisten antara lain faktor profitabilitas dalam penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017) serta Utari dan Supadmi (2017). Faktor *capital intensity ratio* dalam penelitian (Putra dan Merkusiwati (2016) serta Dharma dan Noviari (2017). Faktor ukuran perusahaan diteliti oleh Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Singly dan Sukartha (2015) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Faktor pertumbuhan penjualan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) serta Singly dan Sukartha (2015). Faktor skor CGPI oleh Darmawan dan Sukartha (2014); Lestari dan Putri (2017) serta Nugrahitha dan Suprasto (2018). Komisaris independen dalam penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Utari dan Supadmi (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017) serta Winata (2014). Kepemilikan institusional dalam penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017) serta Winata (2014). Komite audit dalam penelitian Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Praditasari dan Setiawan (2017); Singly dan

Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017) serta Winata (2014). Koneksi politik dalam penelitian Lestari dan Putri (2017) serta Utari dan Supadmi (2017).

Selain itu juga terdapat perbedaan metode penghitungan pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); N. L. P. P. Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Lestari dan Putri (2017) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menggunakan DAR pada faktor independen leverage. Berbeda halnya dengan penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016) serta Singly dan Sukartha (2015) yang menggunakan penghitungan DER.

Berdasarkan nilai *adjusted R square* yang bertujuan mengukur kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi faktor dependen yang dapat dijelaskan oleh faktor independennya. Nilai tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada penelitian sebelumnya yang masih belum mampu menjelaskan sedikitnya sebagian dari faktor yang mempengaruhi tindak penghindaran pajak oleh perusahaan. Seperti penelitian oleh Praditasari dan Setiawan (2017), hanya 32,8% variasi faktor dependen yang mampu menjelaskan faktor independen penelitian, sedangkan sebesar 67,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disebutkan oleh peneliti. Hal tersebut juga terjadi pada penelitian lain seperti Lestari dan Putri (2017) yakni sebesar 69,9% yang perlu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disebutkan oleh peneliti. Pada penelitian Utari dan Supadmi (2017) sebesar 73,9%, penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) sebesar 87,4%, penelitian Wijayanti dan Merkusiwati (2017) sebanyak 93,5%, penelitian Damayanti dan

Susanti (2015) sebesar 65,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Sehingga berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya ialah adanya penambahan faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian sebelumnya agar memperoleh hasil yang lebih relevan.

Saran yang diberikan peneliti sebelumnya, salah satunya ialah penambahan faktor independen seperti penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menyebutkan hubungan politik, kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial agar dapat menjadi pertimbangan dalam mendeteksi aktivitas tax avoidance. Pada penelitian Damayanti dan Susanti (2015) menjelaskan faktor lain yang perlu ditambahkan dalam penelitian selanjutnya ialah *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal. Penelitian dalam Winata (2014) menyarankan untuk menggunakan faktor lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, misal karakteristik perusahaan. Selain itu penelitian Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menyarankan pada penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan faktor lain untuk mempengaruhi penghindaran pajak seperti keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif, koneksi politik, dan umur perusahaan.

Sehingga berdasarkan uraian atas hasil penggabungan dari penelitian sebelumnya Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Chen et al. (2010); Damayanti dan Susanti (2015); Darmawan dan Sukartha (2014) N. L. P. P. Dewi dan Noviari (2017); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Ozkan (2001); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Swingly dan

Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017); Winata (2014); serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017), maka dari itu penelitian selanjutnya ini akan meneliti terkait pengaruh profitabilitas, *capital intensity ratio*, leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit serta koneksi politik terhadap penghindaran. Pembaharuan dalam penelitian ini akan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor–faktor yang mempengaruhi tindakan tax avoidance. Pembaharuan yang dibuat untuk penelitian selanjutnya akan disesuaikan dengan saran yang telah diberikan oleh peneliti sebelumnya, seperti penambahan faktor kepemilikan manajerial atas saran penelitian Darmawan dan Sukartha (2014). Selain itu peneliti juga menggunakan faktor leverage yang menjadi masukan dari penelitian Damayanti dan Susanti (2015). Penggunaan karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan dilakukan atas saran dari penelitian Winata (2014). Penggunaan faktor komite audit dan koneksi politik atas saran dari penelitian Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Sehingga faktor independen yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya adalah profitabilitas, *capital intensity ratio*, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, koneksi politik serta *good corporate governance* (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kepemilikan manajerial). Hal ini disebabkan berdasarkan penelitian sebelumnya, faktor–faktor independen yang akan diteliti ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Ketidak konsistenan hasil dari penelitian tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan indikator pengukuran.

Pada faktor profitabilitas, indikator yang paling banyak digunakan adalah *Return on Asset* (ROA). Hal ini didasarkan pada penelitian oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017); serta Utari dan Supadmi (2017). Penelitian Susilowati dan Turyanto (2011) menggunakan indikator pengukuran berupa *Return On Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM), sedangkan penelitian Agustina (2012) menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM).

Faktor leverage, penggunaan indikator pengukuran *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai yang paling sering digunakan. Indikator *Debt to Asset Ratio* (DAR) pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Lestari dan Putri (2017); serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) berdasarkan penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); serta Swingly dan Sukartha (2015). Sedangkan pada penelitian Putri (2012) menggunakan indikator berupa *Long Term Debt to Equity* yang juga akan digunakan pada penelitian selanjutnya.

Penggunaan indikator pengukuran pada faktor ukuran perusahaan juga berbeda-beda. Log total aset digunakan pada penelitian Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); serta Praditasari dan Setiawan (2017), sedangkan log natural total aset pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Liu dan Cao

(2007); Ozkan (2001); Putra dan Merkusiwati (2016); serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Indikator tersebut adalah yang paling banyak digunakan sebagai pengukuran oleh penelitian–penelitian sebelumnya. Indikator lainnya yang juga digunakan dalam menentukan ukuran perusahaan seperti total aset pada penelitian Dewi dan Wirajaya (2013). Penggunaan indikator yang berbeda tersebut, dapat memungkinkan terjadinya inkonsisten hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Pada faktor *good corporate governance* (GCG) juga menggunakan beberapa indikator yang berbeda. Seperti pada penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Utari dan Supadmi (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017); dan Winata (2014) yang menggunakan indikator komisaris independen. Penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017); serta Winata (2014) menggunakan kepemilikan institusional. Indikator komite audit digunakan oleh peneliti Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Praditasari dan Setiawan (2017); Singly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017); serta Winata (2014). Penggunaan indikator kepemilikan manajerial merupakan saran dari penelitian Darmawan dan Sukartha (2014). Indikator kepemilikan keluarga atas penelitian Rebecca dan Siregar (2012) juga turut digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Namun terdapat juga faktor yang hanya dapat diukur dengan satu indikator saja seperti faktor *Capital Intensity Ratio* yang juga menggunakan indikator

Capital Intensity Ratio (CIR) dalam pengukurannya pada penelitian Putra dan Merkusiwati (2016); serta Dharma dan Noviari (2017). Faktor pertumbuhan penjualan yang menggunakan indikator berupa rasio pertumbuhan berdasarkan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) serta Singly dan Sukartha (2015). Serta koneksi politik yang menggunakan indikator dummy sesuai penelitian Lestari dan Putri (2017).

Tidak hanya faktor independen saja yang mengalami perbedaan indikator, pada faktor dependen berupa *tax avoidance* atau penghindaran pajak juga terjadi perbedaan indikator. Indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menjadi yang paling sering digunakan sesuai pada penelitian oleh Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Chen et al. (2010); Damayanti dan Susanti (2015); N. L. P. P. Dewi dan Noviari (2017); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Ozkan (2001); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Singly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017) serta Winata (2014). Indikator *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Liu dan Cao (2007) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017).

Berdasarkan pada adanya perbedaan indikator yang menyebabkan hasil penelitian yang berbeda juga, maka penulis menggunakan metode analisa faktor konfirmatori sebagai dasar dalam pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Metode analisa faktor konfirmatori (CFA) merupakan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan indikator berdasarkan kemiripannya atau berkorelasi tinggi ke dalam satu faktor (Huang, 2006).

Berdasarkan faktor–faktor ini akan diuji apakah indikator-indikator yang telah ditentukan konsisten terhadap faktornya atau tidak. Penulis akan memakai indikator pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor *tax avoidance* atau penghindaran pajak, profitabilitas, *capital intensity ratio*, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, koneksi politik dan *good corporate governance* (GCG). Hal ini disebabkan berdasarkan penelitian sebelumnya, faktor–faktor yang akan diteliti ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Faktor *tax avoidance* atau penghindaran pajak akan diukur menggunakan 2 indikator (*Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Effective Tax Rate* (ETR)). Faktor profitabilitas akan diukur dengan 4 indikator (*Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Gross Profit Margin* (GPM) serta *Net Profit Margin* (NPM)). *Capital intensity ratio* dengan 1 indikator yaitu *Capital Intensity Ratio* (CIR). Leverage dengan 3 indikator (*Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Equity*). Pertumbuhan penjualan dengan 1 indikator yakni rasio pertumbuhan. Ukuran perusahaan dengan 3 indikator (total aset, penjualan dan jumlah karyawan). Koneksi politik dengan 1 indikator berupa *dummy*, sedangkan *good corporate governance* menggunakan 5 indikator (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Lambert, 2001). Teori agensi merancang sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga perlu adanya kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan jaminan pada agen untuk menerima reward atas hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemilik dan manajemen sering kali menyebabkan konflik kepentingan antara keduanya.

Teori agensi menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik, menyebabkan terjadinya praktik *tax avoidance*. Teori ini merupakan model yang digunakan untuk memetakan permasalahan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Kinerja perusahaan yang telah dicapai akan diinformasikan kepada pihak pemilik dalam melalui laporan keuangan. Sistem desentralisasi yang diterapkan membuat manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding pemilik, karena manajemen berhak atas pengambilan keputusan perusahaan. Manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan level kompensasinya secara potensial ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna aktivitas manajemen. Sehingga manajemen diasumsikan memiliki kemungkinan untuk bertindak sesuai

kepentingan mereka sendiri, bukan secara adil dan bijaksana untuk kepentingan pemilik.

2.2.2 Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan. Teori ini memberikan fokus terhadap bagaimana perusahaan memonitor serta merespon kebutuhan *stakeholder*-nya. Menurut Ghazali dan Chariri (2007) teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya. Oleh sebab itu, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Melalui hal ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai *stakeholder* ialah *shareholders*, karyawan, konsumen atau pelanggan, *supplier*, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.

Stakeholder memiliki kemampuan untuk mengendalikan serta mempengaruhi pemakaian atas sumber ekonomi perusahaan. *Power* yang dimiliki seorang *stakeholder* didasarkan pada besar kecil *power stakeholder* atas sumber tersebut. Hal ini dapat berupa kemampuan dalam membatasi penggunaan sumber ekonomi terbatas seperti modal dan tenaga kerja. Selain itu, *power stakeholder* juga bisa berupa akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan serta kemampuan dalam mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui operasional perusahaan.

2.2.3 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Guna meningkatkan penerimaan pajak negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah akan selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan. Tetapi, perusahaan juga akan selalu berusaha agar dapat meminimalisir pembayaran pajaknya. Hal tersebut dilakukan melalui dua cara yakni legal berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Meski begitu, penghindaran pajak yang melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak.

Pada umumnya wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Sehingga dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Saidi (2004), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan return. Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. Nilai profitabilitas akan menunjukkan

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Demikian diketahui jika semakin tinggi nilai profitabilitas maka menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh perusahaan juga makin meningkat. Sedangkan pengenaan pajak terutang didasarkan pada ketentuan tarif pajak atas penghasilan kena pajak yang merupakan jumlah penghasilan neto perusahaan, sehingga perusahaan berpenghasilan tinggi akan membayar pajak yang tinggi setiap tahunnya. Seiring dengan tingginya beban pajak yang dimiliki perusahaan, maka hal ini dapat memunculkan adanya kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindak penghindaran pajak.

Menurut teori *stakeholder* kegiatan perusahaan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya. Oleh sebab itu perusahaan akan dituntut untuk dapat memberikan benefit pada *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan termasuk dalam kinerja keuangan. Laba dijadikan indikator bagi para *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016). Nilai profitabilitas yang semakin bagus akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sama bagusnya juga terhadap *stakeholder*. Hal ini menyebabkan tingginya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya upaya penghindaran pajak oleh perusahaan. Faktor profitabilitas akan diukur dengan menggunakan 4 indikator yakni *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Gross Profit Margin* (GPM) serta *Net Profit Margin* (NPM).

Return On Asset (ROA) menunjukkan kinerja keuangan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih atas aktiva yang digunakan dalam operasional perusahaan (Susilowati dan Turyanto, 2011). Kinerja keuangan perusahaan yang baik akan memberikan dampak berupa peningkatan laba perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan semakin tinggi. *Return On Equity* (ROE) menyatakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui penggunaan modal yang dimiliki perusahaan (Susilowati dan Turyanto, 2011). Hasil ini akan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik, sehingga nilai ROE yang semakin meningkat akan meningkatkan penghasilan yang diperoleh perusahaan. *Gross Profit Margin* (GPM) digunakan untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksi yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba bruto atas penjualan (Agustina, 2012). Semakin tinggi nilai GPM maka perubahan laba yang diperoleh perusahaan juga semakin tinggi. Nilai GPM yang tinggi akan memperlihatkan bahwa perusahaan mampu menjual produknya di atas harga pokok penjualan, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. *Net Profit Margin* (NPM) digunakan untuk mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap penjualan (Susilowati dan Turyanto, 2011), berdasarkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan penjualan. Nilai NPM yang semakin tinggi akan menandakan bahwa perusahaan juga mendapatkan laba yang cukup tinggi.

Menurut penelitian Darmawan and Sukartha (2014); Dewi and Noviari (2017); Dewinta and Setiawan (2016); serta Praditasari and Setiawan (2017) profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas yang didapat maka semakin

tinggi pula kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini bertentangan dengan penelitian Ariawan and Setiawan (2017); Damayanti and Susanti (2015); Chen et al. (2010); serta Utari and Supadmi (2017) yang justru menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif, berarti tingginya nilai profitabilitas membuat kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Sedangkan menurut Cahyono, Andini, and Raharjo (2016) serta Nugrahitha and Suprasto (2018) bahkan menemukan tidak adanya pengaruh atas profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh *Capital Intensity Ratio* Terhadap Tax Avoidance

Capital Intensity dikaitkan dengan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Muzakki dan Darsono, 2015). Rasionya berdasarkan pada jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Faktor ini juga dapat menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Kepemilikan aset tetap oleh perusahaan akan memunculkan keberadaan biaya depresiasi setiap tahunnya yang mana dapat dimanfaatkan dalam mengurangi pembayaran pajak. Biaya depresiasi akan digunakan oleh manajer guna meminimumkan beban pajak perusahaan yang seharusnya. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap

dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Darmadi, 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dimaknai bahwa semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan penghindaran pajak perusahaan.

Teori agensi menyatakan bahwa dalam perusahaan terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dengan manajemen (agen) yang bertindak sesuai kepentingan diri mereka sendiri. Menurut Muzakki dan Darsono (2015), manajemen memiliki kepentingan berupa meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur ke dalam bentuk aset tetap dengan tujuan memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak. Sehingga untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta mencapai kompensasi kinerjanya, maka manajemen akan melakukan *tax avoidance* berupa pengurangan beban pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviri (2017) yang menemukan adanya pengaruh signifikan positif atas *capital intensity ratio* terhadap penghindaran pajak. Sehingga perusahaan dengan tingkat aset tetap tinggi memiliki beban pajak yang rendah dikarenakan pemotongan pajak oleh adanya biaya depresiasi setiap tahun. Oleh sebab itu, tingginya *capital intensity ratio* juga menunjukkan tingginya kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindak penghindaran pajak sebagai akibat dari munculnya biaya depresiasi. Hal ini

berbeda dengan temuan Putra dan Merkusiwati (2016) yang tidak menemukan adanya pengaruh atas *capital intensity ratio* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H2 : *Capital intensity ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan (Wirna Yola Gusti, 2013). Penambahan jumlah utang menyebabkan bertambahnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak, sehingga dapat diartikan bahwa beban bunga yang tinggi menunjukkan laba yang semakin rendah. Apabila hal ini terjadi maka perusahaan dengan perolehan laba yang rendah, semakin kecil kemungkinan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Pada teori *stakeholder*, manajer dituntut untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholder sehingga kinerjanya dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan (Hidayah, 2017). Menentukan sumber pendanaan menjadi salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh manajemen. Dalam pembiayaan utang terdapat biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak, sehingga dapat

mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Semakin bagus struktur modal suatu perusahaan, maka perusahaan akan mendapat manfaat dari pengurangan beban bunga pinjaman. Sehingga semakin rendah kewajiban pajak suatu perusahaan akan meminimalkan kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Leverage sendiri dapat dihitung menggunakan tidak indikator yakni *debt to asset ratio* (DAR), *debt to equity ratio* (DER) dan *long term debt to equity* (LTDER).

Debt to asset ratio (DAR) untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); serta Ozkan (2001) turut menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai leverage akan menunjukkan utang yang tinggi juga, maka dari itu beban pajak perusahaan akan berkurang sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Berbeda dengan penelitian oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) yang justru menunjukkan adanya pengaruh positif. Tingginya nilai leverage akan menentukan perolehan intensif pajak atas beban bunga bagi perusahaan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak. Seiring dengan meningkatnya *leverage* akibat dari munculnya insentif pajak, maka perusahaan tersebut cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Sedangkan menurut Dewinta dan Setiawan (2016), leverage tidak memiliki berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan *debt to equity ratio* (DER) menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ariawan dan Setiawan (2017) serta Singly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa leverage DER memiliki pengaruh negatif. Semakin tinggi rasio *leverage* maka akan semakin tinggi jumlah hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Sehingga semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul, hal ini membuat berkurangnya beban pajak perusahaan serta kemungkinan terjadinya tindak penghindaran pajak akan semakin rendah. Hal ini berbeda dengan temuan Ariawan dan Setiawan (2017); Nugrahitha dan Suprasto (2018) serta Praditasari dan Setiawan (2017) leverage justru memiliki pengaruh signifikan positif yakni bahwa nilai utang perusahaan (DER) yang tinggi dapat menimbulkan rendahnya nilai CETR perusahaan. Semakin rendah nilai CETR suatu perusahaan akan menyebabkan makin tingginya kecenderungan perusahaan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Darmawan dan Sukartha (2014) serta Putra dan Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa leverage DER tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan leverage terhadap *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H3 : Leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Penjualan dapat dilakukan oleh perusahaan atas dasar keberadaan harta atau aset. Maka dalam upaya peningkatan penjualan hingga mampu memberikan pengaruh strategis terhadap perusahaan, perlu adanya penambahan aset. Optimal atau tidaknya sumber daya perusahaan dapat dilihat melalui penjualan yang dilakukan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan dianggap dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan karena melalui pertumbuhan penjualan juga, perusahaan dapat memprediksi besaran profit yang nantinya akan diperoleh. Peningkatan pertumbuhan penjualan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, sehingga akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Indikator yang akan digunakan dalam mengukur pertumbuhan penjualan ialah rasio pertumbuhan.

Pada teori *stakeholder*, perusahaan diharapkan tidak hanya mampu memberikan benefit pada perusahaan itu sendiri tetapi juga pada pihak yang berkepentingan yakni stakeholder. Pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Melalui hal tersebut perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang juga menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran

pajak. Sedangkan penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H4 : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak berupa badan, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap cara perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya. Machfoedz (1994) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil.

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik sehingga perlu adanya kontak kerja yang melibatkan keduanya. Menurut Azizah (2017) perusahaan dengan skala besar mempunyai sumber daya berlimpah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang menjadi milik perusahaan dapat digunakan oleh agen dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang dikelompokkan dalam ukuran besar dinilai lebih mampu atau stabil dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan berukuran kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka makin stabil kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Munculnya laba yang tinggi, akan dibarengi dengan makin tingginya beban pajak yang diperoleh

perusahaan. Oleh sebab itu guna menghindari pengeluaran yang besar akibat beban pajak tinggi, perusahaan dengan ukuran besar akan tinggi kecenderungannya dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Dewinta dan Setiawan (2016); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); serta Singly dan Sukartha (2015) mendukung bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif. Hal ini dapat dimaknai bahwa ukuran perusahaan yang besar juga menentukan besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Namun pada penelitian Dewi dan Noviari (2017) dan Praditasari dan Setiawan (2017) justru menemukan hasil yang berbeda, bahwa ukuran perusahaan memberi pengaruh signifikan negatif. Perusahaan yang kecil dianggap belum mampu mengelola beban pajaknya secara optimal, sebab minimnya keahlian di bidang tersebut. Sehingga menekan kemungkinan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menemukan tidak adanya pengaruh atas ukuran perusahaan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.6 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan koneksi politik dalam dunia bisnis diharapkan dapat memberi manfaat yang sama baik terhadap pemerintah atau politisi maupun perusahaan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mampu melakukan manajemen pajak dengan lebih agresif karena mendapat perlindungan dari pemerintah atau politisi. Hal tersebut justru menyebabkan kurangnya transparansi laporan keuangan perusahaan yang dapat berakibat negatif, berupa tingginya kebutuhan modal karena minimnya pemodal atau investor. Leuz dan Oberholzer-gee (2006) menyatakan perusahaan harus mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan bisnisnya agar dapat menyusun strategi bersaing yang baik. Salah satu peluang yang dimaksud ialah melalui koneksi politik yang harus dimanfaatkan agar perusahaan dapat meningkatkan dan memperluas jaringan yang memberikan keuntungan.

Pada teori agensi dijelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang muncul antara pemilik perusahaan yaitu pemerintah yang sekaligus berperan sebagai pembuat regulasi dengan pihak manajemen sebagai pembayar pajak. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak (Dharma, 2015). Selaku pemilik perusahaan, maka pemerintah menghendaki adanya pemasukan yang besar dari sektor pajak. Hal ini bertentangan dengan pihak manajemen yang lebih menginginkan laba sebesar-besarnya dengan beban pajak serendah-rendahnya. Koneksi politik pada perusahaan akan diartikan sebagai hubungan istimewa antara perusahaan dengan

pemerintah. Berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik garis lurus, bahwa semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki perusahaan maka akan semakin tinggi praktik penghindaran pajak akibat adanya perlindungan dari pemerintah.

Penelitian menurut Utari dan Supadmi (2017) menemukan adanya pengaruh positif atas koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Namun hal tersebut justru bertentangan dengan penelitian Lestari dan Putri (2017) yang menemukan tidak adanya pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kedekatan yang terjadi antara perusahaan dengan pemerintah justru dianggap mampu membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Penghargaan yang sering kali diberikan oleh pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan koneksi politik terhadap *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H6 : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.7 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

Good Corporate Governance (GCG) diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan (GCG) tidak lepas dari keberadaan organ perusahaan seperti,

rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris yang menjadi bagian di dalamnya.

Teori stakeholder menjelaskan bahwa setiap pemangku kepentingan (stakeholder) berhak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan perusahaan. Kegiatan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terpengaruh oleh kebijakan perusahaan. Tata kelola perusahaan meliputi hubungan antara stakeholder yang terlibat serta tujuan perusahaan. Keberadaan *good corporate governance* akan dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah sebagai berikut :

a. Transparansi (*transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi (*independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Komisaris independen dapat diartikan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan atau tidak terafiliasi dengan anggota direksi di perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya serta pemegang saham mayoritas perusahaan (Praditasari dan Setiawan, 2017). Sesuai fungsinya dalam GCG, keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menurunkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Meningkatnya jumlah dewan komisaris independen, dapat menekan kemungkinan perusahaan melakukan tindak *tax avoidance*. Penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menemukan adanya pengaruh negatif. Komisaris independen dinilai mampu menjalankan fungsi kontrol dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi serta memperketat pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi. Sehingga membuat aktivitas pengurangan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan dalam upaya penghindaran pajak dapat diminimalkan. Lain halnya dengan penelitian Putra dan Merkusiwati 2016 serta Winata (2014) yang justru menunjukkan pengaruh

signifikan positif yang berarti semakin banyak komisaris yang berasal dari luar perusahaan makin kurang efektif pengawasan dan pengendalian kinerja direksi atau manajer dalam pengelolaan perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017) serta Utari dan Supadmi (2017) justru tidak menemukan adanya pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan pihak luar perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor (N. N. K. Dewi dan Jati, 2014). Keberadaannya diharapkan dapat melakukan pengawasan sehingga mencegah konflik antar pihak internal perusahaan yang memiliki kepentingan. Kepemilikan institusional akan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa manajemen perusahaan dalam membuat keputusannya akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Keberadaan pemilik institusional berfungsi penting dalam meningkatkan pengawasan agar lebih optimal sebab dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajemen secara efektif. Dengan begitu tingginya tingkat kepemilikan institusional dapat menyebabkan semakin tingginya tingkat pengawasan terhadap manajemen. Hal ini mampu mengurangi konflik kepentingan antar manajemen, sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan meminimalkan peluang terjadinya penghindaran pajak. Menurut Praditasari dan Setiawan (2017), kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negatif yang dimaksudkan adalah bahwa semakin tinggi

keberadaan pemilik institusional akan tinggi juga pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga penghindaran pajak dapat ditekan. Ariawan dan Setiawan (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Keberadaan pemilik institusional yang tinggi justru meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang kepemilikan institusionalnya tinggi justru semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan pajak, sehingga meningkatkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Lain halnya dengan Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut juga berbeda dengan penelitian Utari dan Supadmi (2017), Wijayanti dan Merkusiwati (2017) serta Winata (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. Menurut Isnanta (2008) dalam Winata (2014), hal ini disebabkan oleh terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap yang memenuhi kepentingan pribadinya.

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan, agar laporan keuangan perusahaan disusun dan disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keberadaan komite audit juga berfungsi untuk melakukan pengawasan agar dapat mengecilkan kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan bahwa meningkatnya jumlah

komite audit, dapat menekan kemungkinan perusahaan melakukan tindak *tax avoidance*. Kemungkinan tersebut senada dengan penelitian oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017) serta Winata (2014) bahwa pengaruh signifikan negatif. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi jumlah anggota komite audit membuat kecenderungan perusahaan dalam melakukan tindak penghindaran pajak juga semakin kecil. Lain halnya dengan Damayanti dan Susanti (2015); Swingly dan Sukartha (2015) serta Utari dan Supadmi (2017) yang justru menemukan bahwa hubungan antara komite audit dengan penghindaran pajak sama sekali tidak memiliki pengaruh.

Kepemilikan manajerial terhadap sekuritas perusahaan dapat menyamakan kepentingan manajerial dengan pihak eksternal. Adanya kepemilikan oleh manajerial membuat manajerial itu sendiri menjadi lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, karena pihaknya tentu akan ikut menanggung konsekuensi atas apa yang terjadi dalam perusahaan.

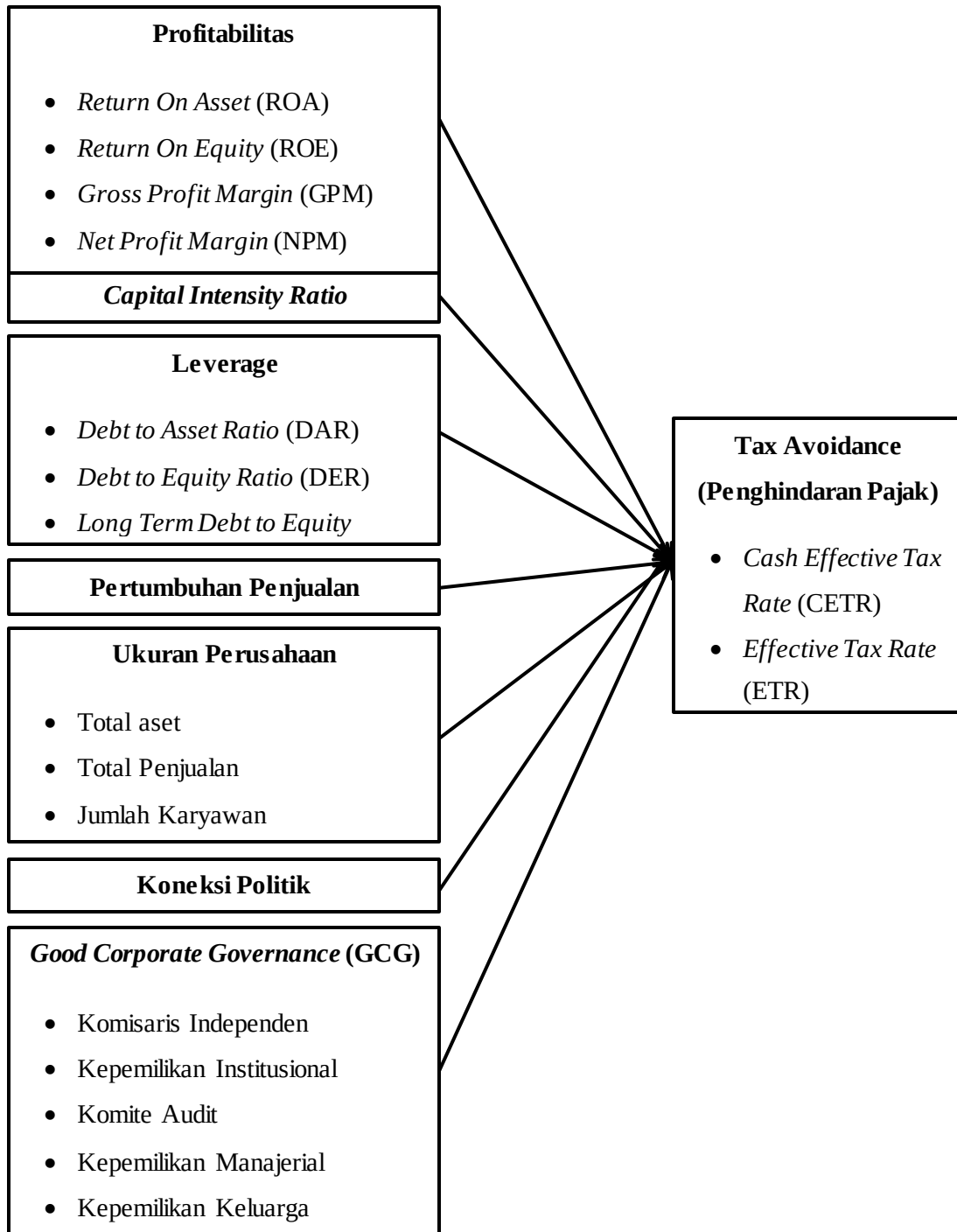
Kepemilikan keluarga dalam perusahaan dianggap jauh lebih efektif karena biaya pengawasan yang dikeluarkan cenderung lebih kecil daripada perusahaan yang dimiliki publik. Adanya kepemilikan keluarga dalam perusahaan dinilai dari besarnya saham yang dimiliki oleh pihak keluarga sebanyak 20% atau lebih. Villalonga dan Amit (2005) menyatakan bahwa dalam perusahaan dengan kepemilikan keluarga, muncul permasalahan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal ini terjadi karena keluarga sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kontrol yang sangat besar terhadap perusahaan dan cenderung menggunakan kontrol yang mereka miliki untuk

meningkatkan keuntungan pribadi pada beban yang ditanggung oleh pemegang saham minoritas sehingga investor akan menginginkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko tersebut (Dyck dan Zingales, 2004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga dalam perusahaan dapat menyebabkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H7 : *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan real estate sebanyak 48 perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada 2013–2017.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Terdaftar sebagai perusahaan properti dan real estate di BEI pada tahun 2013–2016
- 2) Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan keuangannya yang telah diaudit dari tahun 2013 sampai 2016
- 3) Perusahaan properti dan real estate yang menyajikan laporan keuangannya dalam satuan mata uang rupiah
- 4) Perusahaan yang menunjukkan nilai positif pada laba setelah pajak di tahun 2013–2016.

3.1.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)

Tax Avoidance/Penghindaran Pajak (Y)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *tax avoidance* (Y), pengukurannya menggunakan 2 indikator yakni *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Effective Tax Rate* (ETR).

Indikator CETR digunakan pada penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Chen et al. (2010); Damayanti dan Susanti (2015); N. L. P. P. Dewi dan Noviani (2017); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Ozkan (2001); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Swingly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017) serta Winata (2014) dalam pengukuran *tax avoidance*.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Indikator ETR digunakan oleh Darmawan dan Sukartha (2014); Liu dan Cao (2007) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitiannya.

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.1.2 Variabel Bebas (Independent Variable)

3.1.2.1 Variabel Profitabilitas

Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel profitabilitas pada penelitian ini:

1) *Return On Asset (ROA)*

ROA digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atas aset perusahaan, menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017); Utari dan Supadmi (2017) menggunakan ROA dalam mengukur profitabilitas.

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2) *Return On Equity (ROE)*

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi investor. Susilowati dan Turyanto (2011) menggunakan ROE sebagai salah satu indikator pengukuran profitabilitas dalam penelitiannya.

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3) *Gross Profit Margin (GPM)*

GPM digunakan untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksi, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien. Agustina (2012) menggunakan GPM sebagai alat pengukuran profitabilitas dalam penelitiannya.

$$GPM = \frac{Laba\ Bruto}{Penjualan\ Bersih}$$

4) *Net Profit Margin (NPM)*

NPM digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba setelah pajak dari setiap rupiah penjualan. Susilowati dan Turyanto (2011) memasukkan NPM sebagai salah satu indikator profitabilitas dalam penelitiannya.

$$NPM = \frac{Laba\ setelah\ Pajak}{Penjualan\ Bersih}$$

3.1.2.2 Variabel Capital Intensity Ratio

Variabel ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi, diukur menggunakan satu indikator yakni *capital intensity ratio*. Putra dan Merkusiwati (2016) serta Dharma dan Noviari (2017) menggunakan CIR dalam meneliti pengaruhnya terhadap *tax avoidance* :

$$CIR = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$$

3.1.2.3 Variabel Leverage

Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel leverage dalam penelitian ini :

1) *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); Lestari dan Putri (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menggunakan rasio ini untuk mengukur leverage.

$$DAR = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

2) *Debt to Equity Ratio (DER)*

DER digunakan untuk mengetahui sejauh mana ekuitas perusahaan dibiayai oleh kewajiban. Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Singly dan Sukartha (2015) menggunakan DER sebagai rasio dalam mengukur leverage.

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3) *Long Term Debt to Equity (LTDER)*

Putri (2012) menggunakan rasio ini sebagai indikator dalam mengukur leverage pada penelitiannya.

$$LTDER = \frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.1.2.4 Variabel Pertumbuhan Penjualan

Variabel ini digunakan untuk mengukur peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun, menggunakan rasio pertumbuhan. Dewinta dan Setiawan (2016); serta Singly dan Sukartha (2015) menggunakan rasio ini dalam penelitiannya.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1}}{\text{Penjualan}_t}$$

3.1.2.5 Variabel Ukuran Perusahaan

Terdapat tiga indikator yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui ukuran perusahaan.

1) Total aset

Aset merupakan sumber penghasilan atas usahanya sendiri, yang memberikan jasa atau manfaat di masa mendatang. Indikator ini dapat dilihat langsung dalam laporan posisi keuangan berupa jumlah aset (total aset). Dewi dan Wirajaya (2013) dalam penelitiannya menggunakan indikator ini untuk menilai ukuran perusahaan.

2) Penjualan

Indikator penjualan dapat dilihat langsung pada laporan posisi keuangan. Penelitian Hackston dan Milne (1996) menyatakan bahwa indikator penjualan dapat digunakan untuk menilai ukuran perusahaan.

3) Log Jumlah Karyawan

Indikator log jumlah karyawan dapat dilihat pada laporan keuangan atau profil perusahaan. Hackston dan Milne (1996) juga menyatakan bahwa indikator jumlah karyawan dapat digunakan untuk menilai ukuran perusahaan.

3.1.2.6 Variabel Koneksi Politik

Sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 pasal 18 tentang hubungan istimewa, koneksi politik yang dimiliki perusahaan diukur dengan kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari dan Putri (2017).

3.1.2.7 Variabel Good Corporate Governance

Terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mewakili variabel GCG oleh penulis pada penelitian ini.

1) Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen digunakan untuk mendukung efektivitas perusahaan dan monitoring kegiatan yang dilakukan manajer. Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Utari dan Supadmi (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017); Winata (2014) menggunakan komisaris independen sebagai indikator dalam mengukur GCG.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

2) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017); Winata (2014) menggunakan kepemilikan institusional sebagai indikator untuk mengukur GCG dalam penelitiannya. Kepemilikan institusional diukur menggunakan rasio kepemilikan saham institusional dibagi total saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

3) Komite Audit

Pada penelitian Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Damayanti dan Susanti (2015); Praditasari dan Setiawan (2017); Singly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017); Winata (2014) menggunakan komite audit sebagai indikator untuk mengukur variabel GCG. Proporsi yang digunakan dalam indikator ini adalah jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan.

4) Kepemilikan Manajerial

Pada penelitian Indahningrum dan Handayani (2009), kepemilikan manajerial digunakan sebagai indikator pengukuran GCG.

Kepemilikan saham manajerial dimiliki oleh manajer, direksi dan dewan komisaris perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Manajerial}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

5) Kepemilikan Keluarga

Penelitian Rebecca dan Siregar (2012) menggunakan kepemilikan keluarga sebagai indikator dalam mengukur variabel GCG. Proporsi yang digunakan dalam indikator ini adalah sebesar 20% atau lebih kepemilikan saham oleh keluarga.

3.2 Alat Statistik

3.2.1 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *Generalized Linear Model* (GLM), yang bertujuan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen yaitu profitabilitas, *capital intensity ratio* (CIR), *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, koneksi politik, *good corporate governance* (GCG) dengan variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), apakah masing-masing variabel tersebut dapat saling berhubungan positif atau negatif.

3.2.2 Analisis Faktor

Tujuan analisis faktor pada dasarnya ialah untuk menjelaskan struktur hubungan antara banyak variabel dalam bentuk faktor. Berikut proses dalam melakukan analisis faktor :

1) Menyusun matriks korelasi

Pada tahapan ini penulis akan menganalisis apakah data yang ada cukup memenuhi syarat di dalam analisis faktor. Hal ini dilakukan dengan mencari korelasi antar indikator yang diobservasi. Terdapat beberapa ukuran yang bisa digunakan untuk syarat kecukupan data sebagai *rule of thumb* yaitu:

- a. Korelasi matriks antar indikator : Tingginya korelasi antara indikator mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sebuah indikator yang bersifat homogen sehingga setiap indikator mampu membentuk faktor umum atau faktor konstruk. Sebaliknya korelasi yang rendah antara indikator mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut tidak homogen sehingga tidak mampu membentuk faktor konstruk.
- b. Korelasi parsial: Metode kedua adalah memeriksa korelasi parsial yaitu mencari korelasi satu indikator dengan indikator lain dengan mengontrol indikator lain. Korelasi parsial ini disebut dengan negative anti-image correlations.
- c. Kaiser-Meyer Olkin (KMO) : Metode ini paling banyak digunakan untuk melihat syarat kecukupan data untuk analisis faktor. Metode KMO ini mengukur kecukupan sampling secara menyeluruh dan mengukur kecukupan sampling untuk setiap indikator.

2) Ekstraksi faktor

Tahapan ini digunakan untuk mereduksi data yang berasal dari beberapa indikator sehingga menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi antara indikator yang diobservasi.

3) Rotasi Faktor

Tahapan ini bertujuan agar tercapai kesederhanaan terhadap faktor dan meningkatkan kemampuan interpretasinya. Metode rotasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu metode rotasi ortogonal dan metode rotasi oblique. Rotasi orthogonal digunakan bila analisis penelitian bertujuan untuk mereduksi jumlah variabel tanpa mempertimbangkan seberapa berartinya faktor yang diekstraksi. Rotasi oblique digunakan untuk memperoleh jumlah faktor yang secara teoritis cukup berarti.

4) Interpretasikan Faktor

Setelah memperoleh faktor yang valid, maka selanjutnya perlu melakukan interpretasi nama–nama faktor. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui variable-variabel yang membentuknya, serta dilakukan dengan judgment.

3.2.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu cara menggambarkan persoalan yang berdasarkan data yang dimiliki yakni dengan menata data tersebut sedemikian

rupa sehingga dengan mudah dapat dipahami tentang karakteristik data, dijelaskan dan berguna untuk keperluan selanjutnya.

3.2.4 Analisa Regresi Berganda

Analisa regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pengaruh profitabilitas, *capital intensity ratio*, leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, koneksi politik dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Model persamaan dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \epsilon \dots\dots\dots 3.1$$

Keterangan :

Y	= Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
α	= Konstanta
X1	= Profitabilitas
X2	= <i>Capital Intensity Ratio</i>
X3	= Leverage
X4	= Pertumbuhan Penjualan
X5	= Ukuran Perusahaan
X6	= Koneksi Politik
X7	= <i>Good Corporate Governance</i>
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6 \beta_7$	= Koefisien regresi parsial
ϵ	= Error/ Variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam model

3.2.5 Pengujian Hipotesis

3.2.5.1 Profitabilitas

$H_{01}; \beta_1 \leq 0$: Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

$H_{a1}; \beta_1 > 0$: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3.2.5.2 Capital Intensity Ratio

Ho2; $\beta_2 \leq 0$: *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha2; $\beta_2 > 0$: *Capital Intensity Ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3.2.5.3 Leverage

Ho3; $\beta_3 \leq 0$: Leverage tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ha3; $\beta_3 > 0$: Leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3.2.5.4 Pertumbuhan Penjualan

Ho4; $\beta_4 \leq 0$: Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha4; $\beta_4 > 0$: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3.2.5.5 Ukuran Perusahaan

Ho5; $\beta_5 \leq 0$: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha5; $\beta_5 > 0$: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3.2.5.6 Koneksi Politik

Ho6; $\beta_6 \leq 0$: Koneksi Politik tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha6; $\beta_6 > 0$: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3.2.5.7 Good Corporate Governance

Ho7; $\beta_7 \leq 0$: *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ha7; $\beta_7 > 0$: *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan properti dan *real estate* selama periode 2013 – 2016 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi dari masing-masing perusahaan. Terdapat 48 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar. Melalui metode purposive sampling, diperoleh 42 perusahaan terpilih yang dapat digunakan, sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Table 4.1

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan properti dan real estate terdaftar di BEI pada tahun 2013–2016	48
2	Perusahaan properti dan real estate yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan di BEI pada tahun 2013–2016	(6)
	<i>Jumlah perusahaan sampel</i>	42
	<i>Jumlah pengamatan (jumlah sampel x 4 tahun penelitian)</i>	168
	<i>Sampel yang tidak digunakan (terdapat nilai negatif pada laba setelah pajak tahun 2013–2016)</i>	25
	<i>Sampel yang digunakan</i>	143

Sumber : hasil penelitian, 2018

4.2 Analisis Faktor

Tujuan analisis faktor adalah menemukan faktor dengan prinsip kesederhanaan yang dapat menjelaskan struktur hubungan antara banyak variabel.

Tabel 4.2

KMO dan BARTLETT'S TEST

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.632
Approx. Chi-Square	1235.816
Bartlett's Test of Sphericity df	91
Sig.	.000

Sumber : SPSS, 2018

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan hasil uji KMO and Bartlett's bertujuan untuk melihat apakah data memenuhi syarat untuk dianalisis faktor. Syarat utama pada uji ini adalah nilai $KMO > 0.50$, maka data dikatakan cukup dan dapat digunakan untuk analisis faktor. Pada penelitian ini, hasil nilai KMO pada tabel 4.2 sebesar 0.632, sehingga data dapat digunakan untuk melanjutkan analisis faktor.

Tabel 4.3

Nilai KMO

Indikator	Nilai KMO	Indikator	Nilai KMO
Return on Asset	.485 ^a	Log Total Penjualan	.417 ^a
Return on Equity	.527 ^a	Log Jumlah Karyawan	.701 ^a
Gross Profit Margin	.772 ^a	Koneksi Politik	.459 ^a
Net Profit Margin	.251 ^a	Komisaris Independen	.553 ^a
Capital Intensity Ratio	.550 ^a	Kepemilikan Institusional	.660 ^a
Debt to Asset Ratio	.640 ^a	Komite Audit	.599 ^a
Debt to Equity Ratio	.643 ^a	Kepemilikan Manajerial	.527 ^a
Long Term Debt to Equity Ratio	.718 ^a	Kepemilikan Keluarga	.446 ^a
Pertumbuhan penjualan	.513 ^a	Cash Effective Tax Rate	.761 ^a
Log Total Aset	.395 ^a	Effective Tax Rate	.672 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2018

Langkah selanjutnya yakni melihat nilai KMO setiap indikator pada tabel Anti-Images Matrices. Berdasarkan tabel 4.3 yang menunjukkan nilai KMO pada masing-masing indikator terdapat beberapa indikator yang tidak memenuhi syarat yakni < 0.5 . Indikator profitabilitas berupa *return on asset* dari penelitian Ariawan and Setiawan (2017); Cahyono, Andini, and Raharjo (2016); Damayanti and Susanti (2015); Darmawan and Sukartha (2014); Dewi and Noviari (2017); Dewinta and Setiawan (2016); Nugrahitha and Suprasto (2018); Praditasari and Setiawan (2017); Utari and Supadmi (2017) serta *net profit margin* dari penelitian Susilowati and Turyanto (2011). Indikator ukuran perusahaan berupa log total aset dari penelitian Dewi and Noviari (2017); Dewinta and Setiawan (2016); Praditasari and Setiawan (2017) serta log total penjualan dari penelitian Diantimala (2008). Indikator koneksi politik dari penelitian Lestari and Putri

(2017). Indikator *good corporate governance* berupa kepemilikan keluarga dari penelitian Agusti (2014).

Nilai KMO yang tidak memenuhi syarat dapat diartikan bahwa indikator tersebut tidak dapat digunakan dalam analisis faktor. Sehingga perlu dilakukan eliminasi indikator atau dikeluarkan dari analisis faktor dengan melihat nilai KMO terkecil. Pada tabel di atas diketahui bahwa *net profit margin* memiliki nilai KMO paling kecil yakni sebesar .251^a. Setelah indikator *net profit margin* dikeluarkan maka perlu dilakukan analisis faktor ulang.

Tabel 4.4

Nilai KMO

Indikator	Nilai KMO	Indikator	Nilai KMO
Return on Asset	.536 ^a	Log Jumlah Karyawan	.711 ^a
Return on Equity	.556 ^a	Koneksi Politik	.456 ^a
Gross Profit Margin	.755 ^a	Komisaris Independen	.581 ^a
Capital Intensity Ratio	.544 ^a	Kepemilikan Institusional	.662 ^a
Debt to Asset Ratio	.622 ^a	Komite Audit	.573 ^a
Debt to Equity Ratio	.631 ^a	Kepemilikan Manajerial	.545 ^a
Long Term Debt to Equity Ratio	.733 ^a	Kepemilikan Keluarga	.509 ^a
Pertumbuhan penjualan	.525 ^a	Cash Effective Tax Rate	.794 ^a
Log Total Aset	.472 ^a	Effective Tax Rate	.680 ^a
Log Total Penjualan	.481 ^a		

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai KMO < 0.5. Indikator ukuran perusahaan berupa log total aset dari penelitian Dewi and Noviari (2017); Dewinta and Setiawan (2016); Praditasari and Setiawan (2017) serta log total penjualan dari penelitian Diantimala (2008). Indikator koneksi politik dari penelitian Lestari and Putri (2017). Koneksi politik

mempunyai nilai KMO terkecil yakni sebesar .456^a, sehingga perlu dikeluarkan dari analisis faktor.

Tabel 4.5

Nilai KMO

Indikator	Nilai KMO	Indikator	Nilai KMO
Return on Asset	.536 ^a	Log Total Penjualan	.481 ^a
Return on Equity	.552 ^a	Log Jumlah Karyawan	.733 ^a
Gross Profit Margin	.754 ^a	Komisaris Independen	.557 ^a
Capital Intensity Ratio	.518 ^a	Kepemilikan Institusional	.688 ^a
Debt to Asset Ratio	.618 ^a	Komite Audit	.580 ^a
Debt to Equity Ratio	.624 ^a	Kepemilikan Manajerial	.572 ^a
Long Term Debt to Equity Ratio	.722 ^a	Kepemilikan Keluarga	.536 ^a
Pertumbuhan penjualan	.520 ^a	Cash Effective Tax Rate	.804 ^a
Log Total Aset	.469 ^a	Effective Tax Rate	.677 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2018

Pada tabel 4.4 terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai KMO < 0.5. Indikator ukuran perusahaan berupa log total aset dari penelitian Dewi and Noviari (2017); Dewinta and Setiawan (2016); Praditasari and Setiawan (2017) serta log total penjualan dari penelitian Diantimala (2008). Log total aset dengan nilai KMO terkecil yakni .469^a perlu dikeluarkan dari analisis faktor.

Tabel 4.6

Nilai KMO

Indikator	Nilai KMO	Indikator	Nilai KMO
Return on Asset	.564 ^a	Log Jumlah Karyawan	.666 ^a
Return on Equity	.548 ^a	Komisaris Independen	.546 ^a
Gross Profit Margin	.745 ^a	Kepemilikan Institusional	.657 ^a
Capital Intensity Ratio	.462 ^a	Komite Audit	.628 ^a
Debt to Asset Ratio	.673 ^a	Kepemilikan Manajerial	.606 ^a
Debt to Equity Ratio	.587 ^a	Kepemilikan Keluarga	.477 ^a
Long Term Debt to Equity Ratio	.714 ^a	Cash Effective Tax Rate	.795 ^a
Pertumbuhan penjualan	.505 ^a	Effective Tax Rate	.681 ^a
Log Total Penjualan	.437 ^a		

b. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2018

Tabel 4.6 menunjukkan adanya indikator dengan nilai KMO < 0.5 yang berarti tidak dapat digunakan pada analisis faktor. Indikator *capital intensity ratio* dari penelitian Putra and Merkusiwati (2016); Dharma and Noviari (2017). Indikator ukuran perusahaan berupa log total penjualan dari penelitian Diantimala (2008). Indikator *good corporate governance* berupa kepemilikan keluarga dari penelitian Agusti (2014). Sehingga ditemukan bahwa indikator log total penjualan perlu dikeluarkan dari analisis faktor karena tidak memenuhi syarat kecukupan data.

Tabel 4.7

Nilai KMO

Indikator	Nilai KMO	Indikator	Nilai KMO
Return on Asset	.553 ^a	Log Jumlah Karyawan	.611 ^a
Return on Equity	.540 ^a	Komisaris Independen	.453 ^a
Gross Profit Margin	.735 ^a	Kepemilikan Institusional	.681 ^a
Capital Intensity Ratio	.500 ^a	Komite Audit	.632 ^a
Debt to Asset Ratio	.678 ^a	Kepemilikan Manajerial	.598 ^a
Debt to Equity Ratio	.592 ^a	Kepemilikan Keluarga	.540 ^a
Long Term Debt to Equity Ratio	.680 ^a	Cash Effective Tax Rate	.758 ^a
Pertumbuhan penjualan	.493 ^a	Effective Tax Rate	.783 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2018

Pada tabel 4.7 terdapat dua indikator yang tidak memenuhi syarat KMO yakni bernilai kurang dari 0.5. Indikator pertumbuhan penjualan dari penelitian Dewinta and Setiawan (2016); Singly and Sukartha (2015). Indikator *good corporate governance* berupa komisaris independen dari penelitian Ariawan and Setiawan (2017); Cahyono, Andini, and Raharjo (2016); Praditasari and Setiawan (2017); Putra and Merkusiwati (2016); Utari and Supadmi (2017); Wijayanti and Merkusiwati (2017); Winata (2014). Nilai KMO milik komisaris independen menjadi yang terkecil yakni .453^a sehingga harus dikeluarkan dari analisis faktor.

Tabel 4.8

Nilai KMO

Indikator	Nilai KMO	Indikator	Nilai KMO
Return on Asset	.553 ^a	Log Jumlah Karyawan	.644 ^a
Return on Equity	.539 ^a	Kepemilikan Institusional	.670 ^a
Gross Profit Margin	.732 ^a	Komite Audit	.630 ^a
Capital Intensity Ratio	.628 ^a	Kepemilikan Manajerial	.595 ^a
Debt to Asset Ratio	.679 ^a	Kepemilikan Keluarga	.554 ^a
Debt to Equity Ratio	.587 ^a	Cash Effective Tax Rate	.784 ^a
Long Term Debt to Equity Ratio	.672 ^a	Effective Tax Rate	.800 ^a
Pertumbuhan penjualan	.495 ^a		

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2018

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa indikator pertumbuhan penjualan dari penelitian Dewinta and Setiawan (2016); Singly and Sukartha (2015) tidak memenuhi syarat analisis faktor karena nilai KMO < 0.5. Sehingga pertumbuhan penjualan harus dikeluarkan dari analisis faktor.

Tabel 4.9

Nilai KMO

Indikator	Nilai KMO	Indikator	Nilai KMO
Return on Asset	.549 ^a	Log Jumlah Karyawan	.648 ^a
Return on Equity	.537 ^a	Kepemilikan Institusional	.678 ^a
Gross Profit Margin	.727 ^a	Komite Audit	.625 ^a
Capital Intensity Ratio	.610 ^a	Kepemilikan Manajerial	.611 ^a
Debt to Asset Ratio	.686 ^a	Kepemilikan Keluarga	.546 ^a
Debt to Equity Ratio	.589 ^a	Cash Effective Tax Rate	.813 ^a
Long Term Debt to Equity Ratio	.671 ^a	Effective Tax Rate	.831 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 merupakan hasil akhir dari nilai KMO per indikator, setelah mengeluarkan enam indikator dengan nilai KMO < 0.50. Maka dari itu indikator-indikator di atas sudah dapat digunakan dalam membentuk faktor.

Tabel 4.10

Rotated Component Matrix

Rotated Component Matrix^a

	Component			
	1	2	3	4
Debt to Equity Ratio	.916	-.040	.205	-.127
Debt to Asset Ratio	.909	-.021	.227	-.104
Long Term Debt to Equity Ratio	.899	-.073	.089	-.101
Log Jumlah Karyawan	.698	.234	.016	.243
Return on Asset	-.163	.892	.205	.127
Return on Equity	.124	.854	.285	.077
Gross Profit Margin	-.134	.681	-.096	-.044
Cash Effective Tax Rate	-.215	-.577	.291	.137
Effective Tax Rate	-.326	-.482	.238	.066
Kepemilikan Institusional	-.183	.282	-.663	.024
Kepemilikan Manajerial	-.123	-.196	-.610	-.049
Komite Audit	.078	.008	.600	-.111
Capital Intensity Ratio	-.025	.162	-.098	.785
Kepemilikan Keluarga	-.053	-.172	.008	.707

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.^a

a. Rotation converged in 5 iterations.

Hasil rotasi faktor pada tabel 4.10 bahwa indikator *Debt to Equity Ratio*, *Debt to Asset Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio*, Log Jumlah Karyawan, *Return on Asset*, *Return on Equity*, *Gross Profit Margin*, *Cash Effective Tax Rate*, *Effective Tax Rate*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite

Audit, *Capital Intensity Ratio* serta Kepemilikan Keluarga dapat membentuk variabel-variabel.

Angka yang dihasilkan pada tabel 4.10 digunakan untuk menghitung nilai per variabel, dengan persamaan seperti berikut ini :

1. Profitabilitas = (*Return on Asset* x .892) + (*Return on Equity* x .854) + (*Gross Profit Margin* x .681)
2. *Capital Intensity Ratio* = *Capital Intensity Ratio* x .785
3. Leverage = (*Debt to Equity Ratio* x .916) + (*Debt to Asset Ratio* x .909) + (*Long Term Debt to Equity Ratio* x .899)
4. Ukuran perusahaan = Log Jumlah Karyawan x .698
5. *Good Corporate Governance* = (Kepemilikan Institusional x -.663) + (Kepemilikan Manajerial x -.610) + (Komite Audit x .600) + (Kepemilikan Keluarga x .707)
6. Penghindaran pajak = ((*Cash Effective Tax Rate* x -.577) + (*Effective Tax Rate* x -.482)) x -1

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data yang berasal dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Penelitian berikut adalah hasil dari analisis deskriptif yang terdiri dari variabel-variabel independen pada penelitian (*Profitabilitas*, *Capital Intensity Ratio*,

Leverage, Ukuran perusahaan dan *Good Corporate Governance*) serta pada nilai korelasi hasil dari analisis faktor:

Tabel 4.11

Hasil Statistik Deskriptif

	PROFIT	CIR	LAVER	SIZE	GCG
Mean	0.551322	0.078847	1.364077	1.853544	1.374158
Median	0.539135	0.038015	1.191647	1.904348	1.370828
Maximum	1.224308	0.664449	3.607426	2.826354	2.087287
Minimum	0.119442	0.000221	0.057920	0.777532	-0.448971
Std. Dev.	0.184240	0.117694	0.838470	0.426219	0.304829
Skewness	0.987229	2.988531	0.731096	-0.261601	-1.714562
Kurtosis	5.391844	12.81802	2.912231	2.469366	12.00978

Sumber : *Eviews9*, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 terkait hasil statistik deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata (*mean*) profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate sebesar 0.551322 dengan nilai tengah (*median*) sebesar 0.539135. Nilai tertinggi (*maximum*) pada variabel profitabilitas adalah 1.224308 oleh PT. Danayasa Arthama Tbk (SCBD), sedang nilai terendah (*minimum*) sebesar 0.119442 oleh PT. Hanson Internasional Tbk (MYRX). Standar deviasi yakni 0.184240 menunjukkan bahwa data tidak tersebar.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel *capital intensity ratio* pada perusahaan properti dan real estate sebesar 0.078847 dengan nilai tengah (*median*) yakni 0.038015. Nilai tertinggi diperoleh PT. Roda Vivatex Tbk (RDTX) sejumlah 0.664449 sedangkan nilai terendah sebesar 0.000221 oleh PT. Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP). Standar deviasi yakni 0.117694 menunjukkan bahwa data tidak tersebar.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel leverage pada perusahaan properti dan real estate adalah 1.364077 dengan nilai tengah (*median*) yakni 1.191647. Nilai tertinggi diperoleh PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) sejumlah 3.607426 sedangkan nilai terendah sebesar 0.057920 oleh PT. Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP). Standar deviasi yakni 0.838470 menunjukkan bahwa data tidak tersebar.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel ukuran perusahaan (*size*) pada perusahaan properti dan real estate adalah 1.853544 dengan nilai tengah (*median*) yakni 1.904348. Nilai tertinggi diperoleh PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR) sejumlah 2.826354 sedangkan nilai terendah sebesar 0.777532 oleh PT. Hanson Internasional Tbk (MYRX). Standar deviasi yakni 0.426219 menunjukkan bahwa data tidak tersebar.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan properti dan real estate adalah 1.374158 dengan nilai tengah (*median*) yakni 1.370828. Nilai tertinggi diperoleh PT. Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) sejumlah 2.087287 sedangkan nilai terendah sebesar -0.448971 oleh PT. Hanson Internasional Tbk (MYRX). Standar deviasi yakni 0.304829 menunjukkan bahwa data tidak tersebar.

4.4 Analisis Korelasi

Korelasi merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk mengukur adanya hubungan linier antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dua variabel yang berkorelasi akan saling mempengaruhi sehingga apabila terjadi perubahan pada

satu variabel maka akan diikuti oleh perubahan variabel lain, baik dengan arah sama maupun berlawanan. Berikut adalah hasil uji korelasi hubungan antar variabel.

Tabel 4.12

Hasil Uji Korelasi

	PROFIT	CIR	LAVER	SIZE	GCG
PROFIT	1.000000	0.154394	-0.028910	0.146246	-0.085635
CIR	0.154394	1.000000	-0.118780	0.141087	-0.060712
LAVER	-0.028910	-0.118780	1.000000	0.508571	0.231500
SIZE	0.146246	0.141087	0.508571	1.000000	0.100767
GCG	-0.085635	-0.060712	0.231500	0.100767	1.000000

Sumber : *Eviews9*, 2018

Dari tabel Hasil Uji Korelasi diatas dapat diketahui bahwa variabel profitabilitas memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan CIR sebesar 0.154394 dan size sebesar 0.146246. Selain itu variabel profitabilitas juga memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan leverage sebesar -0.028910 serta GCG sebesar -0.085635.

Variabel *capital intensity ratio* (CIR) memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan profitabilitas sebesar 0.154394 dan size sebesar 0.141087. Selain itu variabel CIR juga memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan leverage sebesar -0.118780 serta GCG sebesar -0.060712.

Variabel *leverage* memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan size sebesar 0.508571 dan GCG sebesar 0.231500. Selain itu variabel leverage juga memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan profitabilitas sebesar -0.028910 serta CIR sebesar -0.118780.

Variabel ukuran perusahaan (*size*) memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan empat variabel lain yakni profitabilitas sebesar 0.146246, CIR sebesar 0.141087, *leverage* sebesar 0.508571 dan GCG sebesar 0.100767.

Variabel *good corporate governance* (GCG) memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan *leverage* sebesar 0.231500 dan *size* sebesar 0.100767. Selain itu variabel GCG juga memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan profitabilitas sebesar -0.085635 serta CIR sebesar -0.060712.

4.5 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat statistik *Generalized Linear Model* (GLM), yaitu model linear untuk mengetahui pengaruh perubahan suatu nilai berdasarkan faktor. Menurut Singgih (2016) dalam penggunaan GLM dilakukan sebagai metode yang membentuk model yang data dependennya tidak dapat terdistribusi secara normal. Atau data observasinya tidak terdistribusi normal sehingga mulai menggunakan bentuk/model yang lebih khusus dari regresi linear, berikut hasil yang diperoleh :

Tabel 4.13
Hasil *Generalized Linear Model* (GLM)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.718365	0.155770	-4.611689	0.0000
PROFIT	0.664217	0.127728	5.200249	0.0000
CIR	-0.262638	0.202930	-1.294231	0.1956
LEVER	0.014611	0.033298	0.438794	0.6608
SIZE	0.201876	0.065000	3.105772	0.0019
GCG	-0.191189	0.077474	-2.467791	0.0136

Sumber : *Eviews9*, 2018

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diperoleh hasil bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai *coefficient* sebesar 0.664217. Hal ini menunjukkan koefisien beta profitabilitas sebesar 0.664217 yang dapat menjelaskan penghindaran pajak sebanyak 0.664217% atau dapat diartikan sebagai setiap perubahan satu satuan profitabilitas dapat mengakibatkan perubahan penghindaran pajak sebesar 0.664217%. Kemudian terdapat nilai *z-Statistic* sebesar 5.200249 serta *p value* sebesar 0.0000 (< 0.05). Hal tersebut menandakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga H_1 yang diharapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima.

Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas maka tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi juga. Nilai profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh perusahaan juga makin meningkat. Sedangkan pengenaan pajak terutang didasarkan pada ketentuan tarif pajak atas penghasilan kena pajak yang merupakan jumlah penghasilan neto perusahaan, sehingga perusahaan berpenghasilan tinggi akan membayar pajak yang tinggi setiap tahunnya. Seiring dengan tingginya beban pajak yang dimiliki perusahaan, maka hal ini dapat memunculkan adanya kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindak penghindaran pajak. Sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa kegiatan perusahaan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya. Nilai profitabilitas yang semakin bagus akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sama bagusnya juga di mata *stakeholder*.

Penelitian ini sejalan dengan Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); serta Praditasari dan Setiawan (2017) menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas yang didapat maka semakin tinggi pula kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Namun bertentangan dengan penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Damayanti

dan Susanti (2015); Chen et al. (2010); serta Utari dan Supadmi (2017) yang justru menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif, berarti tingginya nilai profitabilitas membuat kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Sedangkan menurut Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) serta Nugrahitha dan Suprasto (2018) bahkan menemukan tidak adanya pengaruh atas profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

4.6.2 Pengaruh *Capital Intensity Ratio* Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diperoleh hasil bahwa variabel *capital intensity ratio* (CIR) memiliki nilai *coefficient* sebesar -0.262638. Hal ini menunjukkan koefisien beta *capital intensity ratio* sebesar -0.262638 yang dapat menjelaskan penghindaran pajak sebanyak -0.262638% atau dapat diartikan sebagai setiap perubahan satu satuan *capital intensity ratio* dapat mengakibatkan perubahan penghindaran pajak sebesar -0.262638%. Kemudian terdapat nilai *z-Statistic* sebesar -1.294231 serta *p value* sebesar 0.1956 (> 0.05). Hal ini dapat diartikan bahwa bahwa variabel *capital intensity ratio* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka H_2 yang diharapkan variabel *capital intensity ratio* dapat berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CIR berpengaruh negatif tidak signifikan atau dapat diartikan bahwa CIR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai *capital intensity ratio* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi tidak menggunakan aset tetap tersebut

untuk melakukan penghindaran pajak, melainkan kepentingan operasional dan investasi perusahaan. Sehingga proporsi aset tetap yang tidak akan berpengaruh terhadap tindak penghindaran pajak oleh perusahaan (Fajar, 2015).

Hasil ini sesuai dengan penelitian Putra dan Merkusiwati (2016) yang tidak menemukan adanya pengaruh atas *capital intensity ratio* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan bukan dengan sengaja memiliki tingkat aset tetap tinggi untuk melakukan tindak penghindaran pajak. Hal tersebut memang dilakukan dalam rangka menyokong kegiatan operasional serta investasi yang dilakukan perusahaan. Namun berbeda dengan temuan Dharma dan Noviari (2017) yang menemukan adanya pengaruh signifikan positif atas *capital intensity ratio* terhadap penghindaran pajak.

4.6.3 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diperoleh hasil bahwa variabel *leverage* memiliki nilai *coefficient* sebesar 0.014611. Hal ini menunjukkan koefisien beta *leverage* sebesar 0.014611 yang dapat menjelaskan penghindaran pajak sebanyak 0.014611% atau dapat diartikan sebagai setiap perubahan satu satuan *leverage* dapat mengakibatkan perubahan penghindaran pajak sebesar 0.014611%. Kemudian terdapat nilai *z-Statistic* sebesar 0.438794 serta *p value* sebesar 0.6608 (> 0.05). Hal ini dapat diartikan bahwa bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka H_3 yang diharapkan variabel *leverage* dapat berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage*, maka beban bunga suatu perusahaan akan mengalami peningkatan yang mampu mempengaruhi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berhutang agar mengurangi beban pajaknya (Ozkan, 2001). Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga hutang adalah beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan perpajakan. Perusahaan yang memilih kebijakan *leverage* akan mendapatkan insentif pajak yang memanfaatkan beban bunga untuk memperkecil beban pajaknya. Sehingga perusahaan yang memiliki nilai *leverage* tinggi cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* sebagai akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang diterima perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Sesuai dengan teori *stakeholder* yang menuntut manajer untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholder sehingga kinerjanya dinilai baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Ariawan dan Setiawan (2017); Nugrahitha dan Suprasto (2018) serta Praditasari dan Setiawan (2017) bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan positif yakni bahwa nilai utang perusahaan (DER) yang tinggi dapat menimbulkan rendahnya nilai CETR perusahaan. Semakin rendah nilai CETR suatu perusahaan akan menyebabkan makin tingginya kecenderungan perusahaan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Darmawan

dan Sukartha (2014) serta Putra dan Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa leverage DER tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.6.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diperoleh hasil bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai *coefficient* sebesar 0.201876. Hal ini menunjukkan koefisien beta ukuran perusahaan sebesar 0.201876 yang dapat menjelaskan penghindaran pajak sebanyak 0.201876% atau dapat diartikan sebagai setiap perubahan satu satuan ukuran perusahaan dapat mengakibatkan perubahan penghindaran pajak sebesar 0.201876%. Kemudian terdapat nilai *z-Statistic* sebesar 3.105772 serta *p value* sebesar 0.0019 (< 0.05). Hal ini dapat diartikan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka H_5 yang diharapkan variabel ukuran perusahaan dapat berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Machfoedz (1994) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil. Pada teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik sehingga perlu adanya kontak kerja yang melibatkan keduanya. Agen dituntut agar dapat memberikan manfaat pada stakeholder agar dinilai baik. Perusahaan yang dikelompokkan dalam ukuran besar dinilai lebih mampu atau stabil dalam mengelola keuangan dibanding perusahaan berukuran kecil. Semakin besar

ukuran perusahaan maka makin stabil kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Munculnya laba yang tinggi, akan dibarengi dengan makin tingginya beban pajak yang diperoleh perusahaan. Oleh sebab itu guna menghindari pengeluaran yang besar akibat beban pajak tinggi, perusahaan dengan ukuran besar akan tinggi kecenderungannya dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hasil ini didukung oleh penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Dewinta dan Setiawan (2016); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); serta Singly dan Sukartha (2015) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif. Hal ini dapat dimaknai bahwa ukuran perusahaan yang besar juga menentukan besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Namun penelitian Dewi dan Noviari (2017) dan Praditasari dan Setiawan (2017) justru menyatakan bahwa ukuran perusahaan memberi pengaruh signifikan negatif. Perusahaan yang besar dianggap mampu mengelola beban pajaknya secara optimal. Sehingga menekan kemungkinan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menemukan tidak adanya pengaruh atas ukuran perusahaan terhadap tingkat *tax avoidance*.

4.6.5 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diperoleh hasil bahwa variabel *good corporate governance* (GCG) memiliki nilai *coefficient* sebesar -0.191189. Hal ini

menunjukkan koefisien beta GCG sebesar -0.191189 yang dapat menjelaskan penghindaran pajak sebanyak -0.191189% atau dapat diartikan sebagai setiap perubahan satu satuan GCG dapat mengakibatkan perubahan penghindaran pajak sebesar -0.191189%. Kemudian terdapat nilai *z-Statistic* sebesar -2.467791 serta *p value* sebesar 0.0136 (< 0.05). Hal ini dapat diartikan bahwa variabel GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka H_6 yang diharapkan variabel GCG dapat berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel GCG yang diwakilkan melalui empat indikator (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit serta kepemilikan keluarga) berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. *Good Corporate Governance* (GCG) diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Sesuai dengan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa setiap pemangku kepentingan (stakeholder) berhak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan perusahaan. Tata kelola perusahaan meliputi hubungan antara stakeholder yang terlibat serta tujuan perusahaan. Keberadaan *good corporate governance* akan dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017), serta Winata (2014) yang menyatakan bahwa indikator GCG (kepemilikan institusional dan komite audit) memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negatif yang dimaksudkan adalah bahwa semakin tinggi tingkat GCG akan tinggi juga

pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga penghindaran pajak dapat ditekan. Tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) menemukan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat GCG tinggi justru semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan pajak, sehingga meningkatkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Hal tersebut juga berbeda dengan penelitian Damayanti dan Susanti (2015); Singly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017); Wijayanti dan Merkusiwati (2017) serta Winata (2014) yang menemukan bahwa indikator GCG berupa kepemilikan institusional serta komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan oleh adanya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap yang memenuhi kepentingan pribadinya. Selain itu keberadaan komite audit hanya memenuhi ketentuan yakni membantu dewan komisaris yang berfungsi dalam memberi pandangan terhadap masalah kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern mungkin hanya dijadikan pertimbangan dan tidak bisa mempengaruhi perilaku perusahaan (Utari dan Supadmi, 2017).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan sebagai jawaban atas hasil dari penelitian sebelumnya yang tidak konsisten terhadap *tax avoidance*. Penggunaan indikator yang berbeda-beda pada penelitian terdahulu, menjadi alasan bagi penulis untuk menggunakan analisis faktor pada penelitian ini. Sehingga penulis meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, *capital intensity ratio*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, koneksi politik dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan analisis faktor. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis faktor menyisakan 12 dari 18 indikator yang mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *gross profit margin* (GPM), *capital intensity ratio* (CIR), *debt to asset ratio* (DAR), *debt to equity ratio* (DER), *long term debt to equity ratio* (LTDER), log jumlah karyawan, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga. Sebanyak 12 indikator yang tersisa membentuk lima variabel independen yakni profitabilitas, *capital intensity ratio* (CIR), *leverage*, ukuran perusahaan dan *good corporate governance* (GCG).

2. Variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang terbentuk dari indikator *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE) dan *gross profit margin* (GPM).
3. Variabel *capital intensity ratio* (CIR) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang terbentuk atas satu indikator yaitu *capital intensity ratio*.
4. Variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang terbentuk atas tiga indikator berupa *debt to asset ratio* (DAR), *debt to equity ratio* (DER), *long term debt to equity ratio* (LTDER).
5. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang terbentuk atas satu indikator yakni log total jumlah karyawan.
6. Variabel *good corporate governance* (GCG) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang terbentuk atas empat indikator berupa kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial serta kepemilikan keluarga.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, *capital intensity ratio*, leverage, ukuran perusahaan dan *good*

corporate governance terhadap *tax avoidance* yang merupakan pengembangan dari penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Chen et al. (2010); Damayanti dan Susanti (2015); Darmawan dan Sukartha (2014) N. L. P. P. Dewi dan Noviani (2017); Lestari dan Putri (2017); Liu dan Cao (2007); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Ozkan (2001); Praditasari dan Setiawan (2017); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); Singly dan Sukartha (2015); Utari dan Supadmi (2017); Winata (2014); serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) sehingga penelitian ini dapat memberikan kontrol dan pengawasan atas perilaku perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* variabel ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* serta variabel GCG yang berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi penelitian ini menolak dua hipotesis, maka didapatkan hasil bahwa variabel CIR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Metode analisis faktor digunakan sebagai pembaharuan pada penelitian ini, indikator yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dimasukkan seluruhnya lalu dicari indikator yang paling tepat. *Generalized Linear Model* (GLM) yang digunakan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan terutama dalam sektor properti dan real estate dalam pelaksanaan serta pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat terhindar dari praktik penghindaran pajak dan peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah. Selain itu juga agar dapat digunakan oleh pemerintah guna membuat kebijakan perpajakan, dalam rangka meminimalisir praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sesuai dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Dewi dan Noviari (2017); Dewinta dan Setiawan (2016); serta Praditasari dan Setiawan (2017). Dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan dalam melakukan tingkat *tax avoidance*. Hasil penelitian variabel CIR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sesuai dengan penelitian Putra dan Merkusiwati (2016). Hasil penelitian variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sesuai dengan penelitian Ariawan dan Setiawan (2017); Nugrahitha dan Suprasto (2018); Praditasari dan Setiawan (2017) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017), berarti semakin tinggi nilai *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi juga kemungkinan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan. Hasil penelitian variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa

semakin besar ukuran perusahaan maka makin stabil kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Munculnya laba yang tinggi, akan dibarengi dengan makin tingginya beban pajak yang diperoleh perusahaan sehingga akan tinggi kecenderungannya dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014); Dewinta dan Setiawan (2016); Putra dan Merkusiwati (2016); Richardson dan Lanis (2007); serta Singly dan Sukartha (2015). Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel GCG berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sesuai dengan penelitian Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasari dan Setiawan (2017) serta Winata (2014). Semakin baik penerapan mekanisme GCG pada suatu perusahaan maka akan semakin menekan tingkat *tax avoidance*.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Berikut merupakan keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Indikator yang digunakan dalam mengukur *good corporate governance* (GCG) pada penelitian ini terbatas pada kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan kepemilikan keluarga. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah proksi, seperti kualitas audit, karakteristik eksekutif serta *corporate social responsibility* (CSR). Agar pengawasan terhadap kinerja operasional lebih dapat diperhatikan dan lebih besar pengaruhnya untuk pengurangan tindakan *tax avoidance*.

2. Indikator yang digunakan dalam mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah Cash ETR dan ETR. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator lain seperti total book-tax differences (BTD) berupa selisih laba sebelum pajak di laporan laba rugi dengan laba kena pajak secara fiskal dan DTAX berupa selisih pengenaan pajak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sektor perusahaan selain properti dan real estate, seperti halnya sektor pertambangan, sektor manufaktur, sektor keuangan dsb, agar dapat lebih merepresentasikan tindakan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Wirna Yola. 2014. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." Universitas Negeri Padang.
- Agustina, Silvia. 2012. "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 2 (2): 113–22.
- Annisa, Nuralifmida Ayu, dan Lulus Kurniasih. 2012. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 8: 95–189.
- Ariawan, I Made Agus Riko, dan Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556* 18: 1831–59.
- Azizah, Asri Nur. 2017. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016)" Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Cahyono, Deddy Dyas, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013." *Journal Of Accounting* 2 (2).
- Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng, dan Terry Shevlin. 2010. "Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms? \$." *Journal of Financial Economics* 95 (1). Elsevier: 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>.
- Coles, Jeffrey L, Naveen D. Daniel, dan Lalitha Naveen. 2004. "Managerial Incentives dan Risk-Taking" 4475 (2003).
- Damayanti, Fitri, dan Tridahus Susanti. 2015. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan, Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 5 (2): 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim. 2013. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." Universitas Diponegoro.
- Darmawan, I Gede Hendy, dan I Made Sukartha. 2014. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance , Leverage , Return On Assets , Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas*

Udayana 1: 143–61.

Dewi, Ayu Sri Mahatma, dan Ary Wirajaya. 2013. “Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4 (2): 358–72.

Dewi, Ni Luh Putu Puspita, dan Naniek Noviari. 2017. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21: 830–59.

Dewi, Ni Nyoman Kristiana, dan I Ketut Jati. 2014. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2: 249–60. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/26450/>.

Dewinta, Ida Ayu Rosa, dan Putu Ery Setiawan. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14 (3): 1584–1613.

Dharma, I Made Surya. 2015. “Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance.” Bachelor Thesis. Universitas Udayana.

Dharma, Nyoman Budhi Setya, dan Naniek Noviari. 2017. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN: 2302-8556 18: 529–56.

Diantimala, Yossi. 2008. “Pengaruh Akuntansi Konservatif, Ukuran Perusahaan, Dan Default Risk Terhadap Koefisien Respon Laba (ERC).” *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 1 (1): 102–22.

Fadhilah, Rahmi. 2014. “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance”. Artikel Universitas Negeri Padang.

Fajar Adisamarta, Ida Bagus Putu dan Noviari, Naniek. 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 973-1000. ISSN: 2303-1018.

Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hidayah, Adinda Lionita. 2017. “Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.” Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Holme, L., Watts, P., 2006. Human Rights dan Corporate Social Responsibility.

World Business Council for Sustainable Development, Geneva.

- Huang, Ayat Hidayat. 2006. "Analisis Faktor Dengan SPSS." Statistic Consultant for Academic Research. 2006. <http://www.en.globalstatistik.com/analisis-faktor-konfirmatori-dengan-spss/>.
- Lestari, Widya Ayu Gusti, dan I G A M Asri Dwija Putri. 2017. "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18: 2028–54.
- Leuz, Christian, dan Felix Oberholzer-gee. 2006. "Political Relationships, Global Financing, dan Corporate Transparency: Evidence from Indonesia." *Journal of Financial Economics* 81: 411–39. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.006>.
- Liu, Xing, dan Shujun Cao. 2007. "Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Listed Companies in China." *The Chinese Economy* 40 (August 2015): 49–67. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475400603>.
- Loderer, Claudio, dan Urs Waechli. 2010. "Firm Age dan Performance." *MPRA Paper*, no. 26450. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/26450/>.
- Machfoedz. 1994. "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba." *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*.
- Makhfatih, Akhmad. 2005. Penggelapan Pajak di Indonesia: Studi Pajak Hotel non Bintang. Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mulyani, Sri, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P. 2014. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*.
- Muzakki, Muadz Rizki dan Darsono. 2015. "Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Ratio Terhadap Penghindaran Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 4 (3):1-8.
- Nugrahitha, I Made Aditya, dan Herkulanus Bambang Suprasto. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance." *Udayana, E-Jurnal Akuntansi Universitas* 22 (36): 2016–39.
- Ozkan, Aydin. 2001. "Determinants of Capital Structure dan Adjustment to Long Run Target : Evidence from UK Company Panel Data." *Journal of Bussiness Finance & Accounting* 28 (March): 175–98.
- Paligorova, Teodora. 2010. "Corporate Risk Taking dan Ownership Structure." Ottawa, Ontario.

- Prabowo, Dani. 2017. "Sektor Properti Diprediksi Jadi Penyokong Ekonomi Indonesia 2018." *Properti.kompas.com*. 2017. <https://properti.kompas.com/read/2017/10/20/101559221/sektor-properti-diprediksi-jadi-penyokong-ekonomi-indonesia-2018/>.
- Praditasari, Ni Koming Ayu, dan Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19: 1229–58.
- Putra, I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2016. "Pengaruh Komisaris Independen , Leverage , Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17 (1): 690–714.
- Putri, Meidera Elsa Dwi. 2012. "Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Jurnal Manajemen* 1 (1): 1–10.
- Richardson, Grant, dan Roman Lanis. 2007. "Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates dan Tax Reform : Evidence from Australia." *Journal of Accounting dan Public Policy* 26: 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>.
- Shleifer, Anderi, dan Robert W. Vishny. 1986. "Large Shareholders dan Corporate Control." *Journal of Political Economy* 94 (3).
- Siregar, Rifka dan Dini Widyawati. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5 (2).
- Susilo, Richard. 2017. "Indonesia Masuk Peringkat Ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3." *Tribunnews.com*. 2017. <https://m.tribunnews.com/amp/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3/>.
- Susilowati, Yeye, dan Tri Turyanto. 2011. "Reaksi Signal Rasio Profitabilitas Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan Profitability dan Solvability Ratio Reaction Signal Toward Stock Return Company." *Dinamika Keuangan Dan Perbankan* 3 (1): 17–37.
- Suwito, Edy, dan Arleen Herawaty. 2005. "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta." *SNA VIII Solo*, no. September: 15–16.
- Swingly, Calvin, dan I Made Sukartha. 2015. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax

Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 1: 47–62.

Tambunan, Edi Sihar. 2015. “Problematika Pajak di Balik Maraknya Bisnis Properti.” *majalahpajak.net*. 2015. <https://majalahpajak.net/problematika-pajak-di-balik-maraknya-bisnis-properti/>.

Utari, Ni Kadek Yuliani, dan Ni Luh Supadmi. 2017. “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18: 2202–30.

Wijayanti, Yoanis Carrica, dan Ni Ketut Lely A. Merkusiwati. 2017. “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 20: 699–728.

Winata, Fenny. 2014. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013.” *Tax dan Accounting Review* 4 (1).

Xynas, Lidia. 2011. “Tax Planning, Avoidance dan Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses dan Taxpayer Compliance.” *Revenue Law Journal* 20 (1).

Yoehana, Maretta. 2013. “Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak.” Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN 1

Daftar Sampel Perusahaan Properti dan Real Estate

NO	Kode Saham	Nama Emiten
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk
2	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk
3	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk
4	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk
5	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
6	BIPP	Bhuwanatala Indah Permai Tbk
7	BKDP	Bukit Darmo Property Tbk
8	BKSL	Sentul City Tbk
9	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
10	COWL	Cowell Development Tbk
11	CTRA	Ciputra Development Tbk
12	DART	Duta Anggada Realty Tbk
13	DILD	Intiland Development Tbk
14	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
15	ELTY	Bakrieland Development Tbk
16	EMDE	Megapolitan Developments Tbk
17	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk
18	GAMA	Gading Development Tbk
19	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk
20	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk
21	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk
22	JRPT	Jaya Real Property Tbk
23	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
24	LCGP	Eureka Prima Jakarta Tbk
25	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
26	LPKR	Lippo Karawaci Tbk
27	MDLN	Modernland Realty Ltd Tbk
28	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk
29	MTLA	Metropolitan Land Tbk
30	MTSM	Metro Realty Tbk
31	MYRX	Hanson International Tbk
32	NIRO	Nirvana Development Tbk

33	OMRE	Indonesia Prima Property Tbk
34	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk
35	PUDP	Pudjiadi Prestige Tbk
36	PWON	Pakuwon Jati Tbk
37	RBMS	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
38	RDTX	Roda Vivatex Tbk
39	RODA	Pikko Land Development Tbk
40	SCBD	Danayasa Arthatama Tbk.
41	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk
42	SMRA	Summarecon Agung Tbk

LAMPIRAN 2

Data *Cash Effective Tax Rate* 2013-2016

NO	KODE	<i>Cash Effective Tax Rate</i>			
		2013	2014	2015	2016
1	APLN	0.17193	0.17123	0.01271	0.00488
2	ASRI	0.09808	0.07512	0.18378	0.20298
3	BAPA	0.17494	0.36644	0.85828	1.23201
4	BCIP	0.22174	0.16570	0.89671	0.06684
5	BEST	0.04330	0.07827	0.06841	0.04983
6	BIPP	0.02243	0.11099	0.02734	0.09110
7	BKDP	0.02960	0.29128	0.82675	0.00000
8	BKSL	0.06075	0.55697	0.00800	0.03636
9	BSDE	0.25619	0.04038	0.11274	0.00890
10	COWL	0.05521	0.14235	0.22376	0.00000
11	CTRA	0.16025	0.08836	0.16986	0.13176
12	DART	0.16324	0.13319	0.24829	0.07938
13	DILD	0.03647	0.11761	0.17933	0.24902
14	DUTI	0.13798	0.18588	0.04020	0.05929
15	ELTY	0.17193	0.06832	0.47125	0.00000
16	EMDE	0.09808	0.32494	0.06083	0.16049
17	FMII	0.00000	0.49067	0.23200	0.03895
18	GAMA	0.02055	0.02663	0.00215	0.73679
19	GMTD	0.48336	0.09687	0.08511	0.04222
20	GPRA	0.08682	0.18347	0.14720	0.19592
21	GWSA	0.05399	0.05863	0.01271	0.01167
22	JRPT	0.19484	0.07687	0.18378	0.06790
23	KIJA	0.27737	0.09126	0.85828	0.12267
24	LCGP	0.00000	0.00209	0.00000	0.14439
25	LPCK	0.20751	0.10660	0.15172	0.05811
26	LPKR	0.14802	0.07033	0.27272	0.20020
27	MDLN	0.00107	0.00497	0.02554	0.05204
28	MKPI	0.12911	0.17475	0.12538	0.08721
29	MTLA	0.09354	0.08407	0.00666	0.00172
30	MTSM	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	MYRX	2.38867	0.00000	0.00000	0.00000
32	NIRO	0.42130	0.00000	0.00000	0.00000

33	OMRE	0.00000	0.07684	0.00000	0.00117
34	PLIN	0.34757	0.11711	0.01374	0.19924
35	PUDP	0.21085	0.82812	0.25034	0.34426
36	PWON	0.00010	0.05367	0.01028	0.01138
37	RBMS	0.00000	0.26006	0.00000	0.00000
38	RDTX	0.00537	0.09365	0.64774	0.00035
39	RODA	0.06599	0.06453	0.06186	0.09982
40	SCBD	0.04499	0.36981	0.36344	0.29290
41	SMDM	0.35510	0.14056	0.18492	0.53490
42	SMRA	0.11640	0.07375	0.09830	0.19524

LAMPIRAN 3

Data *Effective Tax Rate* 2013-2016

NO	KODE	<i>Effective Tax Rate</i>			
		2013	2014	2015	2016
1	APLN	-0.10111	-0.09635	0.00938	0.01063
2	ASRI	-0.08564	-0.07263	-0.04742	-0.06611
3	BAPA	0.12550	0.12289	-0.04602	-0.03515
4	BCIP	0.11112	0.13228	0.07768	0.01684
5	BEST	0.03963	0.04624	0.00582	0.00598
6	BIPP	0.02598	0.10375	0.02011	0.07989
7	BKDP	0.00000	0.24816	0.00000	0.00000
8	BKSL	-0.02638	-0.19545	0.00289	-0.00003
9	BSDE	-0.05488	-0.03468	-0.00218	-0.00651
10	COWL	0.17553	0.09658	0.00000	0.00000
11	CTRA	0.08349	0.07929	0.09472	0.05636
12	DART	-0.12108	-0.08470	0.12525	0.09725
13	DILD	0.08851	0.08760	0.00018	0.00312
14	DUTI	0.11321	0.07470	0.08037	0.00213
15	ELTY	0.00000	0.06828	0.00000	0.00000
16	EMDE	0.13734	0.13591	0.00000	0.01297
17	FMII	0.00000	0.21561	0.03358	0.03253
18	GAMA	0.09722	0.06291	0.24995	-0.02939
19	GMTD	0.06874	0.05664	0.00377	0.00326
20	GPRA	0.08865	0.00564	0.00612	0.00342
21	GWSA	-0.03108	0.04466	0.00199	0.01112
22	JRPT	0.06516	0.06332	0.00376	0.00452
23	KIJA	0.23535	0.14274	0.01902	0.08084
24	LCGP	0.05435	0.14081	0.00000	0.29155
25	LPCK	0.08322	0.05022	0.00804	0.00883
26	LPKR	0.01833	0.07302	0.09780	0.10222
27	MDLN	0.10265	0.07735	0.04352	0.04309
28	MKPI	0.08407	0.09943	0.00034	0.00017
29	MTLA	0.09722	0.08826	0.00403	0.00806
30	MTSM	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	MYRX	0.47300	-0.00095	0.00000	0.16969
32	NIRO	0.35579	0.00000	0.00000	0.00000

33	OMRE	0.00000	0.06440	0.00000	0.00319
34	PLIN	0.36255	0.00328	-0.01304	-0.39780
35	PUDP	0.04894	0.04802	0.05788	0.06392
36	PWON	0.07048	0.04386	0.00832	-0.01350
37	RBMS	0.00000	0.21724	0.00000	0.00000
38	RDTX	0.06965	0.07290	0.07949	0.07620
39	RODA	0.03595	0.02249	-0.01289	0.02451
40	SCBD	0.03774	0.11026	0.10197	0.46577
41	SMDM	0.18075	0.13639	0.00984	0.00324
42	SMRA	0.08166	0.08488	0.11093	0.14965

LAMPIRAN 4

Data *Tax Avoidance* 2013-2016

NO	KODE	<i>Tax Avoidance</i>			
		2013	2014	2015	2016
1	APLN	-0.07082	-0.07488	-0.02209	-0.01551
2	ASRI	-0.01244	-0.00249	-0.13636	-0.13687
3	BAPA	-0.30044	-0.48933	-0.81226	-1.19686
4	BCIP	-0.33286	-0.29798	-0.97439	-0.08367
5	BEST	-0.08293	-0.12451	-0.07423	-0.05580
6	BIPP	-0.04841	-0.21474	-0.04745	-0.17099
7	BKDP	0.00000	-0.53944	0.00000	0.00000
8	BKSL	-0.00322	-0.36152	-0.82964	-0.03633
9	BSDE	-0.00587	-0.00570	-0.00582	-0.00239
10	COWL	-0.43172	-0.23892	0.00000	0.00000
11	CTRA	-0.13870	-0.16765	-0.20746	-0.18812
12	DART	-0.03918	-0.04849	-0.34901	-0.17664
13	DILD	-0.25175	-0.20521	-0.17004	-0.25214
14	DUTI	-0.14967	-0.26059	-0.32866	-0.06142
15	ELTY	0.00000	-0.13660	0.00000	0.00000
16	EMDE	-0.27532	-0.46085	-0.17933	-0.17346
17	FMII	0.00000	-0.70628	-0.07378	-0.07148
18	GAMA	-0.11777	-0.08954	-0.72120	-0.70741
19	GMTD	-0.55210	-0.15351	-0.06460	-0.04548
20	GPRA	-0.17547	-0.18910	-0.23812	-0.19933
21	GWSA	-0.02291	-0.10329	-0.00415	-0.02279
22	JRPT	-0.26000	-0.14020	-0.08887	-0.07241
23	KIJA	-0.51272	-0.23400	-0.16622	-0.20351
24	LCGP	-0.26186	-0.14291	0.00000	-0.43594
25	LPCK	-0.23124	-0.15682	-0.15976	-0.06694
26	LPKR	-0.01940	-0.14335	-0.37052	-0.30242
27	MDLN	-0.23176	-0.08232	-0.06906	-0.09513
28	MKPI	-0.17762	-0.27418	-0.12572	-0.08738
29	MTLA	-2.86168	-0.17233	-0.01069	-0.00978
30	MTSM	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	MYRX	0.00000	0.00095	0.00000	-0.16969
32	NIRO	-0.77709	0.00000	0.00000	0.00000

33	OMRE	0.00000	-0.14124	0.00000	-0.00436
34	PLIN	-0.71012	-0.12039	-0.00070	0.19856
35	PUDP	-0.25979	-0.87615	-0.30822	-0.40819
36	PWON	-0.07058	-0.09752	-0.01860	0.00212
37	RBMS	0.00000	-0.47729	0.00000	0.00000
38	RDTX	-0.07502	-0.16655	-0.72723	-0.07655
39	RODA	-0.10194	-0.08703	-0.04897	-0.12434
40	SCBD	-0.08273	-0.48007	-0.46542	-0.75867
41	SMDM	-0.53584	-0.27695	-0.19476	-0.53814
42	SMRA	-0.19806	-0.15864	-0.20923	-0.34490

LAMPIRAN 5

Data Profitabilitas 2013-2016

NO	KODE	Profitabilitas			
		2013	2014	2015	2016
1	APLN	0.47951	0.47768	0.49817	0.45597
2	ASRI	0.53711	0.65243	0.62413	0.45051
3	BAPA	0.48407	0.50607	0.47868	0.49240
4	BCIP	0.49235	0.47967	0.34901	0.56248
5	BEST	0.94098	0.68319	0.55113	0.64891
6	BIPP	0.76922	0.44028	0.59796	0.47046
7	BKDP	0.00000	0.35537	0.00000	0.00000
8	BKSL	0.54838	0.31918	0.29280	0.52876
9	BSDE	0.79392	0.81641	0.65775	0.60775
10	COWL	0.44709	0.54580	0.51092	0.00000
11	CTRA	0.52784	0.56073	0.41278	0.43827
12	DART	0.42223	0.53528	0.43401	0.46847
13	DILD	0.42614	0.49456	0.67450	0.38265
14	DUTI	0.69111	0.68268	0.00000	0.68692
15	ELTY	0.00000	0.41522	0.00000	0.00000
16	EMDE	0.43299	0.47030	0.54149	0.52129
17	FMII	0.00000	0.43253	1.11593	1.21265
18	GAMA	0.28318	0.39143	0.22257	0.28797
19	GMTD	0.59294	0.62811	0.62339	0.49460
20	GPRA	0.58138	0.48400	0.48879	0.41515
21	GWSA	0.57888	0.63916	0.81488	0.54617
22	JRPT	0.66310	0.65583	0.68256	0.69557
23	KIJA	0.32380	0.41812	0.38837	0.38889
24	LCGP	0.00000	0.21619	0.00000	0.20129
25	LPCK	0.79486	0.84615	0.72134	0.50736
26	LPKR	0.45254	0.54116	0.36733	0.34963
27	MDLN	1.19626	0.57451	0.58427	0.55776
28	MKPI	0.65714	0.64144	0.76122	0.82233
29	MTLA	0.56500	0.60957	0.56467	0.60937
30	MTSM	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	MYRX	0.11944	0.25147	0.00000	0.40067
32	NIRO	0.31082	0.00000	0.00000	0.00000

33	OMRE	0.00000	0.60190	0.00000	0.49472
34	PLIN	0.42055	0.62387	0.58411	0.84693
35	PUDP	0.51723	0.46843	0.44812	0.39072
36	PWON	0.74232	0.78574	0.58595	0.60212
37	RBMS	0.00000	0.37003	0.00000	0.00000
38	RDTX	0.66984	0.71310	0.76413	0.73681
39	RODA	0.62298	0.65224	0.74498	0.37693
40	SCBD	1.22431	0.55328	0.58394	0.67385
41	SMDM	0.28292	0.32827	0.39550	0.34012
42	SMRA	0.63024	0.63419	0.52329	0.41703

LAMPIRAN 6

Data Capital Intensity Ratio 2013-2016

NO	KODE	<i>Capital Intensity Ratio</i>			
		2013	2014	2015	2016
1	APLN	0.10993	0.10503	0.11560	0.12361
2	ASRI	0.04362	0.04442	0.04603	0.04467
3	BAPA	0.00466	0.00277	0.00133	0.00039
4	BCIP	0.00922	0.03101	0.04012	0.03576
5	BEST	0.01790	0.01645	0.01857	0.02600
6	BIPP	0.23081	0.19769	0.10358	0.07820
7	BKDP	0.00000	0.00780	0.00000	0.00000
8	BKSL	0.09608	0.01106	0.01340	0.01257
9	BSDE	0.01523	0.01696	0.01750	0.01688
10	COWL	0.14335	0.07611	0.00000	0.00000
11	CTRA	0.06943	0.07929	0.08855	0.08192
12	DART	0.00217	0.00362	0.00375	0.00979
13	DILD	0.04274	0.02244	0.01719	0.01615
14	DUTI	0.01723	0.02560	0.02694	0.02783
15	ELTY	0.00000	0.16681	0.00000	0.00000
16	EMDE	0.02752	0.02185	0.02066	0.01664
17	FMII	0.00000	0.13085	0.10104	0.00036
18	GAMA	0.02877	0.02938	0.03061	0.02922
19	GMTD	0.00261	0.00232	0.00217	0.00191
20	GPRA	0.00986	0.00891	0.02336	0.02075
21	GWSA	0.05979	0.07208	0.02455	0.02283
22	JRPT	0.00453	0.00498	0.00911	0.00794
23	KIJA	0.20620	0.20565	0.17669	0.16873
24	LCGP	0.00000	0.00028	0.00000	0.00022
25	LPCK	0.01071	0.00989	0.01161	0.01217
26	LPKR	0.07050	0.06671	0.05189	0.04996
27	MDLN	0.09293	0.08500	0.06895	0.06339
28	MKPI	0.52969	0.38237	0.31467	0.31928
29	MTLA	0.06275	0.07626	0.07890	0.07743
30	MTSM	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	MYRX	0.04007	0.03596	0.00000	0.00030
32	NIRO	0.00144	0.00000	0.00000	0.00000

33	OMRE	0.00000	0.11458	0.00000	0.01790
34	PLIN	0.16230	0.14759	0.13844	0.13710
35	PUDP	0.24004	0.22018	0.20183	0.17154
36	PWON	0.05683	0.04514	0.06092	0.06454
37	RBMS	0.00000	0.00489	0.00000	0.00000
38	RDTX	0.66445	0.62049	0.55298	0.50937
39	RODA	0.00187	0.00177	0.00318	0.00255
40	SCBD	0.07072	0.06755	0.06410	0.06109
41	SMDM	0.06938	0.08391	0.08203	0.08021
42	SMRA	0.02022	0.01872	0.01760	0.01703

LAMPIRAN 7

Data *Leverage* 2013-2016

NO	KODE	<i>Leverage</i>			
		2013	2014	2015	2016
1	APLN	3.06389	3.21608	2.97357	2.73173
2	ASRI	3.04256	3.17762	3.40562	3.43799
3	BAPA	1.55416	1.39053	1.18241	1.07487
4	BCIP	1.30031	1.86241	2.84273	2.95251
5	BEST	0.71413	0.53749	1.14641	1.13915
6	BIPP	0.64520	0.77091	0.49825	0.85848
7	BKDP	0.00000	0.73391	0.00000	0.00000
8	BKSL	1.13098	1.04363	1.20543	1.04281
9	BSDE	1.31034	1.00201	1.24516	1.16430
10	COWL	0.91954	3.39225	0.00000	0.00000
11	CTRA	1.73490	1.73612	1.74222	1.87773
12	DART	1.33824	1.24306	1.39550	1.43961
13	DILD	1.56349	1.93672	1.96750	2.36955
14	DUTI	0.46626	0.60352	0.64268	0.49788
15	ELTY	0.00000	1.46742	0.00000	0.00000
16	EMDE	1.14085	1.59345	1.37272	1.76415
17	FMII	0.00000	1.05279	0.56781	0.25470
18	GAMA	0.39078	0.46825	0.38217	0.40734
19	GMTD	3.60743	2.15924	2.03844	1.50080
20	GPRA	1.24723	1.31231	1.15022	1.03376
21	GWSA	0.27982	0.32897	0.19389	0.18362
22	JRPT	1.84008	1.59194	1.27309	1.13680
23	KIJA	1.83598	1.71004	1.99202	1.88707
24	LCGP	1.54492	0.12776	0.00000	0.05792
25	LPCK	2.38231	0.94378	0.94454	0.63478
26	LPKR	1.92901	2.26140	2.41224	2.12386
27	MDLN	0.89980	1.89891	2.04584	2.28542
28	MKPI	1.11366	1.55809	1.57941	1.29772
29	MTLA	0.18054	1.08871	1.15552	1.06705
30	MTSM	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	MYRX	1.20089	0.34729	0.00000	0.73590
32	NIRO	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

33	OMRE	0.00000	0.57852	0.00000	0.08458
34	PLIN	1.74707	1.87034	1.86966	1.91767
35	PUDP	0.62186	0.75026	0.76800	1.06589
36	PWON	2.18209	1.89517	1.82036	1.63786
37	RBMS	0.00000	0.32404	0.00000	0.00000
38	RDTX	0.60891	0.41753	0.35204	0.30358
39	RODA	1.12743	0.80084	0.57191	0.49461
40	SCBD	0.63712	0.89225	0.98474	0.82264
41	SMDM	0.68150	0.80116	0.54417	0.45125
42	SMRA	3.13350	2.79886	2.72420	2.89862

LAMPIRAN 8

Data Ukuran Perusahaan 2013-2016

NO	KODE	Ukuran Perusahaan			
		2013	2014	2015	2016
1	APLN	2.20496	2.21366	2.30184	2.29567
2	ASRI	2.16430	2.19054	2.21549	2.27184
3	BAPA	1.06897	1.05992	1.03103	1.08630
4	BCIP	1.36406	1.56564	1.60914	1.60154
5	BEST	1.51072	1.54224	1.56737	1.63639
6	BIPP	1.52093	1.50442	1.51891	1.55506
7	BKDP	0.00000	1.55146	1.91277	0.00000
8	BKSL	1.77052	1.84444	2.33630	1.83887
9	BSDE	2.35532	2.34596	0.00000	2.33534
10	COWL	1.84167	1.91332	0.00000	0.00000
11	CTRA	2.34728	2.37966	2.42224	2.46129
12	DART	1.89402	1.91661	1.89519	1.89925
13	DILD	2.17446	1.99943	2.20726	2.22548
14	DUTI	1.41933	1.41079	2.31848	2.31717
15	ELTY	0.00000	2.04187	0.00000	0.00000
16	EMDE	1.48921	1.50442	1.52885	1.54411
17	FMII	0.00000	1.42764	1.20354	1.29218
18	GAMA	1.03103	1.11824	1.16712	1.16060
19	GMTD	1.40200	1.45875	1.44617	1.41079
20	GPRA	1.97395	2.06574	1.84787	1.64047
21	GWSA	1.33584	1.41933	1.47786	1.48472
22	JRPT	1.82000	1.88206	1.91332	1.93147
23	KIJA	1.91878	1.93508	1.99060	2.00231
24	LCGP	0.00000	0.98765	0.00000	1.04097
25	LPCK	2.13478	2.14004	2.17770	2.16140
26	LPKR	2.64552	2.82443	2.82635	2.75824
27	MDLN	2.07941	2.11985	2.13105	2.13689
28	MKPI	2.04828	2.06172	2.06707	2.06441
29	MTLA	2.11705	2.14494	2.15945	2.17260
30	MTSM	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	MYRX	1.08630	1.20921	0.00000	0.77753
32	NIRO	1.20921	0.00000	0.00000	0.00000

33	OMRE	0.00000	2.05352	0.00000	2.00190
34	PLIN	2.22626	2.24062	2.23930	2.23305
35	PUDP	1.83675	1.82298	1.82593	1.86705
36	PWON	2.29799	2.40945	2.40967	2.43911
37	RBMS	0.00000	1.11824	0.00000	0.00000
38	RDTX	2.14030	1.88750	1.68565	1.61655
39	RODA	1.70594	1.77228	1.82150	1.61655
40	SCBD	1.40200	1.44099	1.99652	1.98239
41	SMDM	1.90945	1.88988	1.82667	1.82000
42	SMRA	2.26709	2.31992	2.34885	2.35570

LAMPIRAN 9

Data *Good Corporate Governance* 2013-2016

NO	KODE	<i>Good Corporate Governance</i>			
		2013	2014	2015	2016
1	APLN	1.33662	1.33662	1.26985	1.27060
2	ASRI	1.45651	1.45867	1.45867	1.50900
3	BAPA	1.58963	1.54790	1.54790	1.54790
4	BCIP	1.45237	1.41528	1.35729	1.61139
5	BEST	1.39252	1.41458	1.41340	1.41340
6	BIPP	1.36010	1.36010	1.28957	1.28957
7	BKDP	0.00000	1.42458	0.00000	0.00000
8	BKSL	1.52430	1.48418	1.43826	1.47646
9	BSDE	1.38147	1.36980	1.37185	1.39517
10	COWL	1.18008	1.18126	0.00000	0.00000
11	CTRA	1.54309	1.54566	1.50880	1.49209
12	DART	1.20550	1.20550	1.20550	1.19572
13	DILD	1.51794	1.51794	1.51794	1.51794
14	DUTI	1.32448	1.36975	1.36825	0.54999
15	ELTY	0.00000	1.60508	0.00000	0.00000
16	EMDE	1.26004	1.26004	1.26004	1.26930
17	FMII	0.00000	1.21741	1.33315	1.30147
18	GAMA	1.40230	1.40230	1.40761	1.40761
19	GMTD	1.36905	1.36905	1.36905	1.36905
20	GPRA	0.63816	0.64583	1.32107	1.23478
21	GWSA	1.27274	1.27274	1.27274	1.27274
22	JRPT	1.27508	1.27215	1.27558	1.26734
23	KIJA	1.66762	1.66762	1.62845	1.63515
24	LCGP	0.00000	1.53721	0.00000	1.58735
25	LPCK	1.52022	1.52022	1.52022	1.52022
26	LPKR	1.67985	1.65347	1.65347	1.53120
27	MDLN	1.55532	1.56159	1.57428	1.57428
28	MKPI	1.87702	1.87702	1.87907	1.87928
29	MTLA	1.20920	1.20832	1.20758	1.23889
30	MTSM	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	MYRX	1.80000	-0.44897	0.00000	1.66533
32	NIRO	1.23931	0.00000	0.00000	0.00000

33	OMRE	0.00000	1.20270	0.00000	1.31257
34	PLIN	1.20947	1.20686	1.22095	1.19199
35	PUDP	2.08177	2.08177	2.08177	2.08729
36	PWON	1.45389	1.41798	1.45395	1.42776
37	RBMS	0.00000	1.35820	0.00000	0.00000
38	RDTX	0.65030	0.63403	0.64560	0.68654
39	RODA	1.34713	1.34713	0.74712	1.34712
40	SCBD	1.25362	1.25362	1.25362	1.25362
41	SMDM	1.20888	1.16890	1.16897	1.16897
42	SMRA	1.54960	1.54960	1.54960	1.54960

LAMPIRAN 10

Hasil *Generalized Linear Model* (GLM)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.718365	0.155770	-4.611689	0.0000
PROFIT	0.664217	0.127728	5.200249	0.0000
CIR	-0.262638	0.202930	-1.294231	0.1956
LAVAR	0.014611	0.033298	0.438794	0.6608
SIZE	0.201876	0.065000	3.105772	0.0019
GCG	-0.191189	0.077474	-2.467791	0.0136
Mean dependent var	-0.241483	S.D. dependent var		0.317970
Sum squared resid	10.34251	Log likelihood		-14.77579
Akaike info criterion	0.288553	Schwarz criterion		0.412295
Hannan-Quinn criter.	0.338834	Deviance		10.34251
Deviance statistic	0.074946	Restr. Deviance		14.45798
LR statistic	54.91265	Prob(LR statistic)		0.000000
Pearson SSR	10.34251	Pearson statistic		0.074946
Dispersion	0.074946			